

SKRIPSI

**PARTISIPASI KOMUNITAS LOKAL DALAM PENGELOLAAN
PARIWISATA PANTAI DATO DI KABUPATEN MAJENE**

WAHYU

Nomor Stambuk : 10561 05153 14



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2019**

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Partisipasi Komunitas Lokal dalam
Pengelolaan Pariwisata Pantai Dato Kabupaten
Majene

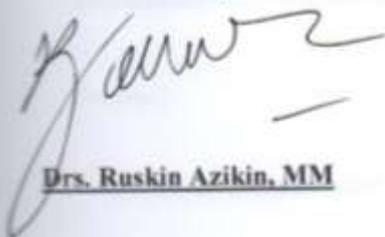
Nama Mahasiswa : Wahyu

Nomor Stambuk : 1056 1051 5314

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I



Drs. Ruskin Azikin, MM

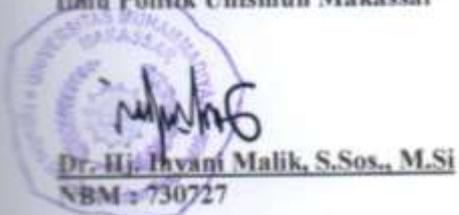
Pembimbing II



Nasrulhaq, S.Sos, M.PA

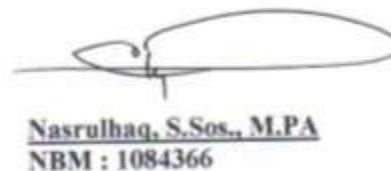
Mengetahui :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Unismuh Makassar



Dr. Hj. Irvani Malik, S.Sos., M.Si
NBM : 730727

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi
Negara Fisip Unismuh Makassar



Nasrulhaq, S.Sos., M.PA
NBM : 1084366

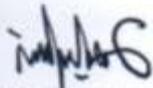
PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0012/FSP/A.4-VIII/II/40/2019 sebagai satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.I) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara Di Makassarhari Kamis tanggal 28 Februari 2019..

TIM PENILAI

Ketua,

Sekretaris,



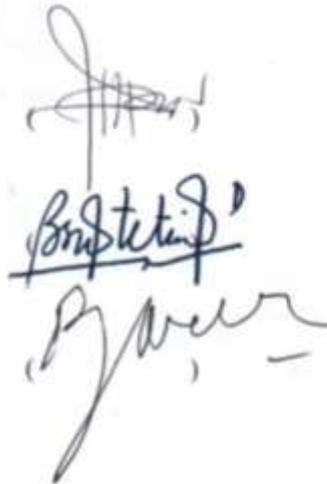
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si



Dr. Burhanuddin, S. Sos, M.Si

Penguji :

1. Dr. H. Muhammadiyah, MM (Ketua)
2. Dr. Hj.Budi Setiawati, M. Si
3. Drs. Ruskin Asikin, MM



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Wahyu

Nomor Stambuk : 10561 05153 14

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku.

Makassar, 01 January 2019

Yang Menyatakan,

Wahyu

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan yang berjudul "Partisipasi Komunitas Lokal dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Dato di Kabupaten Majene".

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pada lembaran ini penulis hendak menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua, ayahanda M. Yusuf dan Ibunda Naharia atas segala kasih sayang, cinta, pengorbanan serta do'a yang tulus dan ikhlas yang senantiasa beliau panjatkan kepada Allah SWT sehingga menjadi pelita terang dan semangat yang luar biasa bagi penulis dalam menggapai cita-cita. Ucapan terima kasih kepada saudarasya Yusriani Yusuf dan Supriadi Yusuf beserta segenap keluarga yang telah memberikan motivasi dan dukungan moril maupun materil demi kesuksesan penulis.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat, ayahanda Drs. Ruskin Azikin, M.M selaku pembimbing I dan ayahanda Nasrulhaq, S.Sos., M.PA selaku pembimbing II yang telah berkenan

meluangkan waktu dan tenaganya dalam membimbing dan memberikan petunjuk yang begitu berharga dari awal persiapan penelitian hingga selesainya skripsi ini.

Penulis juga tak lupa hanturkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Prof. Dr. H. Abd Rahman Rahim, S.E, M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibunda Dr. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ayahanda Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan 1 fisip unismuh Makassar yang selama ini turut membantudalam kelengkapan berkas hal-hal yang berhubungan Administrasi perkuliahan dan kegiatan akademik.
4. Kakanda Nasrul Haq, S.Sos, MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara berkat motivasi yang diberikan penulis merasakan semangat yang luar biasa dalam melewati masa pahit dan masa sulit di akhir kuliah.
5. Ibunda Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si selaku ketua jurusan ilmu pemerintahan yang selalu memberikan motivasi dalam setiap waktu sampai di akhir perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu dosen Ilmu Administrasi Negara yang telah menyumbangkan ilmunya kepada penulis selama mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan dan seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak membantu penulis.
7. Para pihak Dinas/Instansi yang adapada lingkup pemerintah Kabupaten Majene yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.

8. Kakanda dan adinda Muhammad Aswar Darwis, S.Sos, Kakanda Akhsrullah, S.Sos., M.AP Kakanda Hamdan, S.Sos Kakanda Sardiman Saad, S.Sos dan Saudara Iswadi Amiruddin, S.Sos, Jihan fahira, Nanda ardisia fathunnisa, akbar, rijal serta kakanda istanata malate yang selalumembantudan menyemangati dalam penyelesaian skripsi.
9. Kepada seluruh keluarga besar sopol Universitas Muhammadiyah Makassar, terutama kepada satu angkatan 2014 Ilmu Administrasi Negara terkhusus kelas H hengki, irwan, ammar, yahya, tri agung, mega, mita, fitri, riska, meli, dll tanpa terkecuali.
- 10 Kakanda, Adinda, dan teman-teman Pengurus BEM SOSPOL, HUMANIERA serta KIMAP.
- 11 Kakanda dan adinda Pengurus ikatan mahasiswa mandarmajeneindonesia (IM3I)
- 12 Kakanda dan adinda Pengurus forum komunikas mahasiswa mandar Sulawesi barat (FKMM).
- 13 Kakanda dan adinda Pengurus Besar Nusantara Institute
- 14 Sodara kumaman, hamsah, wahab, majid, dahsan, mulyadi, kadri, erwin, rajab dan sodara-sodaraku yang lain yang selalum menyemangati untuk penyelesaian skripsi.
- 15 Letting-lettingku di AFILIASIBakti, Konco, Cempaga, Syamsir, Bambang bamz, Syem, Nanda, Ahmad, Arfandi, Fikram, Erwinsyah, Wiwing, Randi, Irsan, Kasming, Saifullabonto, Rahman, Iksan Fadillah, Fajar, Erwin, Irfan Fadli, yang selalum memberisemangat dalam penyelesaian skripsi.

Diakhir tulisan ini penulis memohon maaf kepada semua pihak atas segala kekurangan dan kehilafan, disadari maupun yang tidak disadari. Demi kesempurnaanskripsiini, saran dankritik yang sifatnyamembangunsangatpenulisharapkan.Semogakaryaskripsiinibermanfaatda ndapatmemberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar 17 February 2019

WAHYU

ABSTRAK

Wahyu. *Partisipasi Komunitas Lokal Dalam Pengelolaan Parawisata Pantai*

Dato Di Kabupaten Majene (dibimbingoleh Ruskin Azikin dan Nasrulhaq)

Partisipasi komunitas lokal dalam pengelolaan parawisata pantai dato di Kabupaten Majenemasi sangat terbatas baik dari segi akomodasi, tempat tinggal, jasa boga dan restoran, transportasi dan jasa angkutan, antraksi wisata, cenderamata (souvenir). Untuk sekarang di kawasan wisata pantai Dato Majene masi kurang tempat penginapan bagi para wisatawan yang ingin bermalam di pantai Dato, untuk mendukung kawasan suatu wisata diperlukan fasilitas-fasilitas pendukung sebagai penunjang kawasan wisata tersebut.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata pantai Dato Kabupaten Majene serta pendekatan-pendekatan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata pantai Dato Kabupaten Majene.

Tipe penelitian ini yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu penulis bermaksud mendeskripsikan Partisipasi komunitas lokal dalam pengelolaan parawisata pantai dato di Kabupaten Majene dengan memilih orang tertentu yang dianggap memiliki pengetahuan tentang Partisipasi komunitas lokal dalam pengelolaan parawisata pantai dato di Kabupaten Majene. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini adalah 8 orang, sumber data terdiridari data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan maupun arsip-arsip resmi yang dapat didukung dengan kelengkapan data primer.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi komunitas lokal dapat dikatakan berjalan sesuai dengan aturan tetapi belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan yang dimana dari segi partisipasi harta benda belum ada dari masyarakat secara umum maupun masyarakat lokal sekitaran pantai Dato tetapi dari partisipasi lain sudah berjalan namun belum optimal secara umum serta karena masi minimnya kesadaran yang dimiliki, tata kelola pengelolaan parawisata belum sepenuhnya di pahami oleh masyarakat secara umum serta masi terdapat masyarakat lokal yang mengabaikan regulasi yang suda ditetapkan oleh Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Parawisata tentang penyamaan retribusi pantai Dato.

Kata Kunci : *Partisipasi Komunitas Lokal, Pengelolaan Pariwisata Pantai Dato*

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iii
Daftar Isi	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Partisipasi	9
1. Pengertian Partisipasi	9
2. Lingkup Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	12
3. Tingkatan Partisipasi Masyarakat	13
4. Bentuk Partisipasi Masyarakat	14
5. Keberhasilan Partisipasi Masyarakat	16
B. Konsep Manajemen Pariwisata	19
1. Fungsi-Fungsi Manajemen	19
2. Pengertian Pariwisata	21
3. Pariwisata Berkelanjutan	22
4. Upaya Pelestarian Lingkungan Objek Wisata	26
5. Pengelolaan Pariwisata Konvensional	27
C. Kerangka Pikir	31

D. Fokus penelitian.....	32
E. Deskripsi fokus	32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	35
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	35
C. Sumber Data	36
D. Informan Penelitian.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Teknik Analisis Data.....	39
G. Keabsahan Data	40

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Majene.....	42
1. Gambaran Umum Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene.....	49
2. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene.....	50
3. Visi Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene.....	52
4. Tata Kelola dan Daftar Kunjungan pantai Dato Kabupaten Majene.....	52
B. Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Dato Kabupaten Majene.....	59
1. Partisipasi Buah Pikiran.....	59
2. Partisipasi Tenaga.....	63
3. Partisipasi Harta Benda.....	67
4. Partisipasi Keterampilan Dan Kemahiran.....	71

5. Partisipasi Sosial.....	75
C. Pendekatan Masyarakat Dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Dato Kabupaten Majene.....	79
1. Partisipasi Pasif Dan Pelatihan Informasi.....	79
2. Sesi Partisipasi Aktif.....	83
3. Partisipasi Dengan Keterikatan.....	88
4. Partisipasi Atas Permintaan Setempat.....	92
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	100

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.....	25
Tabel 2.2.....	29
Tabel 3.1.....	37
Tabel 4.1.....	44
Tabel 4.2.....	45
Tabel 4.3.....	46
Tabel 4.4.....	47
Tabel 4.5.....	58
Tabel 4.6.....	58

DAFTAR GAMBAR

2.1 Skema Kerangka Pikir.....	31
2.2 Struktur Organisasi.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Majene adalah salah satu daerah provinsi Sulawesi Barat yang mempunyai banyak objek wisata antara lain wisata Alam, wisata Sejarah, wisata Budaya, Wisata minat khusus objek wisata dan yang sangat terkenal yaitu wisata alam pantai Dato Majene. Pantai Dato Majene ini adalah salah satu wisata bahari yang jarang tersentuh oleh wisatawan, Pantai Dato Majene sendiri berjarak kurang lebih 7 km dari pusat kota Majene. Untuk menuju lokasi pantai Dato Majene dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan pribadi atau angkutan umum, kira-kira 15 menit dari kota Majene.

Pariwisata merupakan sektor yang kompleks karena pariwisata bersifat multidimensi, baik fisik, politik, sosial budaya dan ekonomi. Kegiatan pariwisata sebagai kegiatan mata rantai yang melibatkan berbagai sektor dan lembaga terkait. Seperti yang ada di Indonesia pariwisata adalah sektor yang diandalkan, hal ini terbukti pariwisata telah memberikan kontribusi yang sangat besar sebagai penyumbang devisa terbesar setelah minyak dan gas bumi. Oleh karena itu diperlukan sebuah pengelolaan yang baik dalam meningkatkan daya tarik bagi para wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah.

Berdasarkan hasil survey tahun 2016 yang dilakukan Kemenpar terkait progres perkembangan pariwisata Majene dalam (mandarnews.com). Kementerian pariwisata menunjuk Kabupaten Majene sebagai kawasan pengembangan pariwisata nasional. Kabupaten Majene sebagai kawasan pengembangan pariwisata nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah nawacita (PP) Nomor 50 Tahun 2011 tentang rencana induk pengembangan kepariwisataan nasional (Ripparnas) tahun 2011-2025. Kemenpar menetapkan 222 kawasan pengembangan pariwisata nasional (KPPN) dan Majene berada pada urutan 171. Majene masuk dalam wilayah Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Toraja-Lorelindu dan sekitarnya. Selanjutnya pemerintah provinsi visi misi Sulawesi Barat maju malaqbi: program prioritas melalui OVOP (One Village One Product) yakni “Pembangunan kampung 3 bahasa di kelurahan baurung kecamatan banggae timur”. Pemerintah kabupaten melalui program prioritas revolusi pariwisata. “Pembangunan 5 objek wisata dan daya tarik wisata unggulan “pantai Dato, pantai Barane, Puskesmas labuang, Pulo baluno/Hutan mangrove dan Air panas makula limboro “.

Pantai Dato Majene ini mempunyai ciri khas dan keindahan tersendiri di mana keindahan pantai Dato Majene ini terbagi 2 bagian yaitu pantai yang berpasir putih halus dan pantai yang beralaskan karang. Selain itu di pantai ini terdapat karang yang menjorok ke laut atau karang yang berlubang karena hantaran ombak menambah keunikan dan keindahan pantai Dato Majene. Di ataskarang yang

menjorokkelautsaatindahduduksantaimenikmati hembusan angin laut,
tempat memancing atau menikmati liukan kecil berwarna-warni melalui air laut
yang jernih dari atas batukarang.

Pantai

Dato

Majene ini memiliki keunikan dan keistimewaan tersendiri berbeda dengan pantai-
pantai di wilayah pulau Sulawesi. Selain memiliki panorama alam pantai tropis yang
sangat indah. Pantai ini juga tergolong masialam dan terjaga dengan baik, Oleh karena
itu, pantai Dato Majene ini menjadi salah satu lokasi wisata keluarga yang banyak
di kunjungi oleh para wisatawan terutama pada saat akhir pekan dan hari libur.

Bagi wisatawan yang menginginkan untuk tinggal beberapa hari lagi di
dekat kawasan wisata ini, terdapat tempat menginap di hotel yang
tidak jauh dari kawasan wisata pantai Dato
Majene ini. Sehingga dengan adanya kekayaan budaya ini para wisatawan tidak hanya me-
nikmati pemandangan yang indah di pantai Dato
Majene tetapi dapat juga menikmati wisata budaya.

Menurut Joyosuharto

(2000)

bahwa pengembangan pariwisata memiliki tiga fungsi, yaitu : 1)
mengalakkan ekonomi, 2)
memelihara kepribadian bangsa dan kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup, 3)
memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa.
Untuk menjalankan ketiga fungsi tersebut maka di
perlu pengembangan objek wisata dan daya tarik wisata,
meningkatkan dan mengembangkan promosi dan pemasaran,

serta meningkatkan pendidikan dan pelatihan kepariwisataan. Harus diakuikawasanwisata
nirikurangtereksplorkeindahanwisatapantai Dato Majeneselainitu, hal yang
menyebabkan kurang berkembangnyawisatapantai Dato
Majeneini adalah sangatterbatas fasilitas yang disediakan di
tempat wisatani sehingga tidak dapat memenuhiapa yang
diinginkan parapengunjung.

Sementara itu yang terjadi di pantai Dato
Majenesangatterbatas baik dari segi akomodasi, tempat tinggal, jasa bogadan restoran, tr
ansportasi dan jasa angkutan, antraksi wisata, cenderamata (souvenir). Untuk sekarang
di kawasan wisatapantai Dato
Majene masih kurang tempat penginapan bagi parawisatawan yang ingin bermalam di
pantai Dato, untuk mendukung kawasan suatu wisatadiperlukan fasilitas-
fasilitas pendukung sebagai penunjang kawasan wisatatersebut.

Selain itu banyak nyapotensi yang adaseperti terumbu karang, pasir pantai yang
putih dan halus, batu-batu yang berukuran besar, karang-
karang besar dan perkampungannelayan tidak dilengkapi sarana pendukung untuk meni-
kmatifasilitas yang ada. Sudah seharusnya pemerintah Kabupaten
Majene memperhatikan potensi besar yang dimiliki kawasan pantai
Dato dan menjadikantempat ini sebagai tempat yang
menarik. Untuk membuat kawasan pantai Dato sebagai kawasan yang
menarik maka diperlukan rencana untuk merevitalisasi kawasan Teluk Tamiang ini,
Rencana revitalisasi tersebut adalah menyediakan dan membangun unsur-
unsur pendukung dalam sebuah pariwisata. Hal pertama yang

harus dilakukan adalah merevitalisasi pantai Dato dengan membuat sebuah konsep wisata yang menarik dan melengkapi fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh para wisatawan serta mengaitkan pembuatan film-film dokumenter mengenai keindahan dan potensi yang dimiliki pantai Dato Majene.

Untuk mengatasi masalah komoditas tempat tinggal di bangun penginapan-penginapan bagi wisatawan yang ingin bermalam. Pembangunan penginapan ini menjadi potensi besar dan dapat menambah pendapatan daerah serta menambah peluang kerja bagi masyarakat disekitar pantai Dato sehingga dengan adanya penginapan yang bagus para wisatawan betah berwisata di pantai Dato Majene. Selama ini para wisatawan yang datang hanya terdapat penginapan yang sederhana dan belum dilengkapi fasilitas-fasilitas yang memanjakan wisatawan.

Adapun partisipasi masyarakat di pantai Dato Majene kurang intensif itu dikarenakan kurangnya fasilitas-fasilitas yang ada di pantai Dato Majene. Disisi lain banyaknya pengelolaan-pengelolaan yang tidak terstruktur, baik itu pemerintah, masyarakat, serta komunitas lokal yang ada di pantai Dato Majene. Untuk itu dengan adanya pengelolaan-pengelolaan yang terstruktur pariwisata pantai Dato Majene dapat memberikan kontribusi dalam kesejahteraan masyarakat terkhususnya masyarakat Majene.

Dengan demikian pengelolaan pariwisata pantai Dato Majene harus mampu memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakat secara umum dan terkhususnya masyarakat Majene. Melihat apa yang terjadi dalam pengelolaan pariwisata pantai Dato Majene masih kurang baik, untuk itu baiknya ada kolaborasi

masyarakat, komunitas lokal serta pemerintah daerah dalam pengelolaan pariwisata pantai Dato Majene. Disisi lain pantai Dato Majene termasuk pantai yang sering dikunjungi oleh masyarakat secara umum dengan melihat keindahan pantai Dato Majene. Untuk itu dalam pengelolaan pariwisata pantai Dato Majene akan memberikan dampak yang baik kepada masyarakat masyarakat, komunitas lokal serta pemerintah daerah Kabupaten Majene.

Masyarakat di pantai Dato Majene sangat antusias dalam pengembangan pariwisata pantai Dato Majene. dikarekan dengan adanya pengembangan pantai Dato masyarakat di sekitar pantai itu akan memberikan dampak yang positif dalam pengembangan pariwisata, Seperti masyarakat yang tadinya pengangguran tetapi dengan adanya pengembangan serta, pengelolaan pantai Dato ini dapat memberikan kesejahteraan dalam proses pengelolaan pariwisata. Adapun peraturan/regulasi pembangunan pariwisata Kabupaten Majene.

1. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2010
Tentang Pajak Hotel.
2. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2010
Tentang Pajak Restoran.
3. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Nomor 10 Tahun 2010
Tentang Pajak Hiburan.
4. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun
Tentang TDUP.

5. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010
Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas,
peneliti tertarik untuk meneliti tentang
“Partisipasi Komunitas Lokal Dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Dato Kabupaten Majene”.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata pantai Dato di Kabupaten Majene ?
2. Bagaimana pendekatan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata pantai Dato di Kabupaten Majene ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas,
maka tujuan penelitian ini adalah.

1. Untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata pantai Dato di Kabupaten Majene.
2. Untuk mengetahui pendekatan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata pantai Dato di Kabupaten Majene.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah, pengetahuan dan pengalaman dalam mengkaji dan mengembangkan daya tarik wisata khususnya di kawasan Pantai Dato Kabupaten Majene.
- b. Dapat menambah literatur bahan kajian penelitian dalam pengembangan sebuah daya tarik wisata kepada peneliti-peneliti selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Majene dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Dato di Kabupaten Majene.
- b. Diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Majene dalam merumuskan Strategi Kebijakan yang tepat, khususnya dalam pengelolaan Pariwisata Pantai Dato di Kabupaten Majene.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Partisipasi

1. Pengertian Partisipasi

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata "*participation*" yang dapat diartikan suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan ikut serta atau ambil bagian dalam sebuah kegiatan suatu organisasi. Sehubungan dengan partisipasi merupakan keterlibatan aktif masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu kunci agar pengembangan wisata berjalan dengan tujuan yang diinginkan. Peran masyarakat sangat diperlukan baik dalam perencanaan, pengembangan, pengelolaan dan evaluasi kerja. Sebagai

komponen utama dalam *community based tourism* (CBT), masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam menunjang pembangunan pariwisata. Pembangunan pariwisata akan sulit terwujud ketika masyarakat setempat merasadiabaikan, hanya sebagai objek, serta merasaterancam oleh kegiatan pariwisata di daerah mereka. Dalam mengembangkan suatu daya tarik wisata, partisipasi atau keterlibatan masyarakat lokal tidak bisa diabaikan begitusaja. Masyarakat lokal merupakan orang pertama yang mengetahui tentang kondisidaerahnya daripada orang yang berasal dari luar daerah. Dengan demikian, partisipasisasyarakat lokal sangat diperlukan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengembangan hingga akhir yaitu evaluasi kerja. Harapan kedepannya ialah tiada lain untuk mewujudkan sikap rasa memiliki padadiri masyarakat lokal sendiri, sehingga timbul kesadaran dan tanggung jawab untuk ikut serta dalam mengembangkan daya tarik wisata. Partisipasi masyarakat tidak hanyasebatas partisipasi masyarakat semata, namun diharapkan pada tahap selanjutnya yaitu partisipasi masyarakat dalam menilai apakah pembangunan yang dilakukan sudah sesuai harapan dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Partisipasisasyarakat merupakan peranan yang utamadalam penyelenggaraan pembangunan. Dengan demikian pengembangan pariwisata dapat menambah lapangan kerja serta kesempatan membangun usaha, meningkatkan dan menumbuhkan kebudayaan yang ada di daerah pengembangan pariwisata.

Di Indonesia, berbagai peraturan yang diberikan ruang partisipasi masyarakat baik nasional maupun sektoral telah disiapkan. Beberapa diantaranya UU No.17/2003 Keuangan Negara, UU No.23/2014 tentang Pemerintah Daerah, dan UU No.25/2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Secara garis besarnya partisipasi berarti keikutsertaan seseorang atau sekelompok pada suatu proses kegiatan. Pengertian tersebut selaras dengan pengertian dalam kamus besar sosiologi yang disebutkan bahwa, partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, diluar pekerjaan atau profesnya sendiri (Teodorson, dalam Mardikanto dan Soebiato, 2013:81).

Partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program atau proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat lokal. Dengan partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan diupayakan menjadi lebih terarah, artinya rencana atau program pembangunan yang disusun itu adalah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, berarti dalam rencana/program pembangunan dilakukan penentuan proiritas, dengan demikian pelaksana pembangunan akan terlaksana pula secara efektif dan efesien.

Menurut FAO dalam Mikkelsen (2011), berbagai kajian, dokumen proyek dan buku panduan menunjukkan tafsiran yang sangat beragam mengenai arti kata partisipasi:

- a. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.

- b. Partisipasi adalah “pemekan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemampuan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan.
- c. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk menggunakan hal itu.
- d. Partisipasi dalam pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak sosial.
- e. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dengan perubahan yang ditentukannya sendiri.
- f. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka.

2. Lingkup Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Telaahan tentang pengertian “partisipasi” yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi atau peran serta, pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan secara aktif dan sukarela. baik karena alasan-alasan dari dalam (*instinsik*) maupun dari luar (*ekstrinsik*) dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan, yang mencakup pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian (pemantauan, evaluasi, pengawasan), serta pemanfaatan hasil-hasil kegiatan yang dicapai. Karena itu, Yadav, Toto Mardikanto dan Poerwoko Soebiato (2013) mengemukakan tentang

adanya empat macam kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pembangunan, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi, serta partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.

a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Pada umumnya, setiap program pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan sumber daya lokal dan alokasi anggarannya) selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam banyak hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok kecil elit yang berkuasa dan mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak.

b. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, seringkali diartikan sebagai partisipasi masyarakat banyak (yang umumnya lebih miskin) untuk secara suka rela menyumbangkan tenaganya di dalam kegiatan pembangunan. Di lain pihak, lapisan yang di atasnya (yang umumnya terdiri atas orang-orang kaya) dalam banyak hal lebih banyak memperoleh manfaat hasil pembangunan, tidak dituntut sumbangannya secara proporsional.

c. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan

Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembangunan sangat di perlukan. Bukan saja agar tujuannya dapat dicapai seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan.

d. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan unsur terpenting yang sering terlupakan. Sebab tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Di samping itu pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang.

3. Tingkatan Partisipasi Masyarakat

Karena konsep partisipasi dalam perkembangannya memiliki makna yang luas dan memiliki arti yang berbeda-beda, bahkan apapun yang disebut “partisipasi” , maka untuk memudahkan memaknainya dapat digunakan tingkatan partisipasi. Menurut *Asia Development Bank* (ADB) seperti dikutip Soegijoko (2005), tingkatan partisipasi (dari yang terendah sampai tertinggi) sebagai berikut:

a. Berbagi informasi bersama (sosialisasi)

Pemerintah hanya menyebarkan informasi tentang program yang akan direncanakan atau sekedar memberikan informasi mengenai keputusan yang dibuat dan mengajak warga untuk melaksanakan keputusan tersebut.

b. Konsultasi/mendapatkan umpan balik

Pemerintah meminta saran dan kritik dari masyarakat sebelum suatu keputusan ditetapkan.

c. Kalaborasi/pembuatan keputusan bersama

Masyarakat bukan sebagai penggagas kalaborasi, tetapi masyarakat dilibatkan untuk merancang dan mengambil keputusan bersama, sehingga peran masyarakat secara signifikan dapat mempengaruhi hasil/keputusan.

d. Pemberdayaan/kendali

Masyarakat memiliki kekuasaan dalam mengawasi secara langsung keputusan yang telah diambil dan menolak pelaksanaan keputusan yang bertentangan dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan prosedur dan indikator kinerja yang mereka tetapkan bersama.

4. Bentuk Partisipasi Masyarakat

Telah disinggung dalam bagian sebelumnya, secara sederhana partisipasi bisa diartikan sebagai keikutsertaan seseorang, kelompok, atau masyarakat dalam program pembangunan. Pertanyaan ini mengandung arti seseorang, kelompok, atau masyarakat senantiasa dapat memberikan kontribusi/sumbangan yang sekiranya mampu untuk menunjang keberhasilan program pembangunan dengan berbagai bentuk atau jenis partisipasi (Huraerah, Abu 2011).

(Simanjuntak dalam Huraerah, Abu 2011), Bentuk partisipasi yang dimaksud adalah macamnya sumbangan yang diberikan kepada seseorang, kelompok, atau masyarakat yang berpartisipasi. Sehubungan dengan penjelasan tersebut, ada beberapa jenis-jenis partisipasi sebagai berikut:

- a. Partisipasi buah pikiran, yang diberikan partisipasi dalam ajang sono, pertemuan atau rapat.

- b. Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain, dan sebagainya.
- c. Partisipasi harta benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain, dan sebagainya.
- d. Partisipasi keterampilan dan kemahiran, yang diberikan orang untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industri.
- e. Partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda kegotongroyongan, misalnya turut arisan, koperasi, layad (dalam peristiwa kematian), kondangan (dalam peristiwa pernikahan), nyambulang, mulang sambung.

Sedangkan (Sulaiman dalam Huraerah, Abu 2011) membagi bentuk-bentuk partisipasi sosial ke dalam lima macam yaitu:

- 1) Partisipasi langsung dalam kegiatan bersama secara fisik dan tatap muka.
- 2) Partisipasi dalam bentuk iuran uang atau barang dalam kegiatan partisipatori, dana, dan sarana sebaiknya datang dari dalam masyarakat sendiri. Kalaupun terpaksa diperlukan dari luar, hanya bersifat sementara dan sebagai umpan.
- 3) Partisipasi dalam bentuk dukungan.
- 4) Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
- 5) Partisipasi representatif dengan memberikan kepercayaan dan mandat kepada wakil-wakil yang duduk dalam organisasi atau panitia.

Dengan memperhatikan kedua pendapat tentang bentuk-bentuk partisipasi sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, sebetulnya tidak ada perbedaan yang mencolok, hal tersebut memiliki maksud yang sama. Maksud dari pembagian partisipasi adalah untuk menunjukkan luasnya kemungkinan-kemungkinan yang dapat digunakan orang kalau akan berpartisipasi. Dengan kata lain, untuk berpartisipasi sumbangan orang hendaknya jangan dilihat hanya dari jumlah tenaga dan harta benda yang diberikan. Karena kalau partisipasi dibatasi pada sumbangan tenaga dan harta benda saja, berarti mereduksi esensi konsep dasar partisipasi tersebut.

5. Keberhasilan Partisipasi Masyarakat

Menurut Najib (2005) keberhasilan partisipasi dipengaruhi oleh:

- a. Siapa penggagas partisipasi: apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah atau LSM. *Non-government stakeholders* berpeluang untuk lebih lanjut.
- b. Untuk kepentingan siapa partisipasi itu dilaksanakan: apakah untuk kepentingan pemerintah atau masyarakat. Jika untuk kepentingan warga maka program kemiskinan dengan pendekatan partisipasi masyarakat akan lebih berkelanjutan.
- c. Siapa yang memegang kendali: apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga donor. Jika pemerintah daerah atau LSM yang memegang kendali cenderung lebih mengetahui permasalahan, kondisi, dan kebutuhan daerah atau masyarakatnya dibanding pihak luar.

- d. Hubungan pemerintah dengan masyarakat: apakah ada kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintahannya, jika hubungan ini baik, partisipasi akan lebih mudah dilaksanakan.
- e. Kultural: daerah yang masyarakatnya memiliki tradisi dalam berpartisipasi (proses pengambilan keputusan melalui musyawarah) cenderung lebih muda dan berkelanjutan.
- f. Politik: pemerintahan yang stabil serta menganut sistem yang transparan, menghargai keberagaman dan demokratis.
- g. Legalitas: tersedianya (diupayakan) regulasi yang menjamin partisipasi warga dalam pengelolaan pembangunan (terintegrasi dalam sistem pemerintahan di daerah).
- h. Ekonomi: adanya mekanisme yang menyediakan akses bagi warga miskin untuk terlibat atau memastikan bahwa mereka akan memperoleh “manfaat” (langsung maupun tidak langsung) setelah berpartisipasi.
- i. Kepemimpinan: adanya kepemimpinan yang disegani dan memiliki komitmen untuk mendorong serta melaksanakan partisipasi, dapat dari kalangan pemerintah, LSM, masyarakat itu sendiri atau tokoh masyarakat.
- j. Waktu: penerapan partisipasi tidak hanya sesaat, tetapi ditetapkan pada kurun waktu yang cukup lama.
- k. Tersedianya jaringan yang menghubungkan antar warga masyarakat dan pemerintah (forum warga).

Club du Sahel dalam Anita (2011) Pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk memajukan partisipasi antara lain:

1) Partisipasi Pasif dan Pelatihan Informasi

Tipe komunikasi satu arah seperti antara guru dan muridnya yang ditetapkan diantara staf proyek dan masyarakat setempat pada saat kunjungan ke desa. Paket-paket teknis yang berbeda diiklankan kepada masyarakat untuk menerimanya.

2) Sesi partisipasi aktif (Pendekatan “Pelatihan dan Kunjungan)

Dialog dan komunikasi dua arah memberikan kepada masyarakat kesempatan untuk berinteraksi dengan npetugas penyuluh dan pelatih dari luar .

3) Partisipasi dengan keterikatan (Pendekatan “kontrak tugas yang dibayar”: bila anda melakukan ini, maka proyek akan melakukan itu).Masyarakat setempat tidak baik sebagai pribadi ataupun kelompok kecil, diberikan pilihan untuk terikat pada sesuatu dengan tanggungjawab atas setiap kegiatan pada masyarakat dan juga pada proyek. Manfaatnya : dapat dibuat modifikasi seiring tujuan yang diinginkan.

4) Partisipasi atas permintaan setempat (Pendekatan “*Participatory Rural Appraisal*” dan kegiatan proyek berfokus lebih kegiatan penelitian, pendekatan yang didorong oleh permintaan).Kegiatan proyek lebih berfokus lebih pada menjawab kebutuhan yang dinyatakan oleh masyarakat setempat, bukan kebutuhan yang dirancang dan disuarakan oleh orang luar. Metode yang dipakai adalah motivasi dan animasi bukan “menjual atau mendorong”. Pertanyaan sukarela dan permintaan untuk bantuan serta lebih banyak informasi jelas diperlukan.

B. Konsep Manajemen Pariwisata

1. Fungsi-Fungsi Manajemen

Fungsi-fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Manajemen memberikan tekanan terhadap kenyataan bahwa manajer mencapai tujuan atau sasaran dengan mengatur karyawan dan mengalokasikan sumber-sumber material dan finansial. Bagaimana manajer mengoptimasi pemanfaatan sumber-sumber, memadukan menjadi satu dan mengkonversi hingga menjadi output, maka manajer harus melaksanakan fungsi-fungsi manajemen untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber dan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas untuk mencapai tujuan.

Sedangkan Menurut Fayol dalam Safroni (2012: 47), fungsi-fungsi manajemen meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*commanding*), pengkoordinasian (*coordinating*), pengendalian (*controlling*).

Dari fungsi-fungsi manajemen tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan yang harus dilaksanakan oleh setiap manajer secara berurutan supaya proses manajemen itu diterapkan secara baik (Hasibuan, 2005: 3-4). Persamaan tersebut tampak pada beberapa fungsi manajemen di bawah ini:

a. Perencanaan (*planning*)

Planning atau perencanaan adalah tindakan memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang

akan datang dalam hal memvisualisasikan serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan.

b. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian yaitu penentuan penggolongan dan penyusunan aktivitas-aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan, penentuan orang-orang yang akan melaksanakan, penyediaan alat-alat yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dan pendelegasian wewenang yang ditugaskan dalam bidang aktivitas masing-masing (Rachmat, 1986:41). Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-sumber yang diperlukan, termasuk manusia, sehingga pekerjaan yang dikehendaki dapat dilaksanakan dengan berhasil. (Terry dan Rue, 2010: 82).

c. Penggerakan/Pelaksanaan (*actuating*)

Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa, hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan bersama. Penggerakan adalah membuat semua anggota organisasi mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.

d. Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai

pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana atau selaras dengan standar.

2. Pengertian Pariwisata

Secara umum pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan seseorang untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan meninggalkan tempat semula dan dengan suatu perencanaan atau bukan maksud untuk mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati kegiatan pertamasyaan atau rekreasi untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam. Pariwisata secara singkat dapat dirumuskan sebagai kegiatan dalam masyarakat yang berhubungan dengan wisatawan (Soekadijo, 2000: 2).

Sedangkan Menurut Marpaung (2002: 13), mendefinisikan pariwisata sebagai perpindahan sementara yang dilakukan manusia dengan tujuan keluar dari pekerjaan-pekerjaan rutin, keluar dari tempat kediamannya. Aktivitas dilakukan selama mereka tinggal di tempat yang dituju dan fasilitas dibuat untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Sedangkan Menurut Hadwin (2013), pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok. Sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu. Suatu perjalanan dianggap sebagai perjalanan wisata bila memenuhi tiga persyaratan yang diperlukan, yaitu:

- a. Harus bersifat sementara

- b. Harus bersifat sukarela (*voluntary*) dalam arti tidak terjadi karena dipaksa
- c. Tidak bekerja yang sifatnya menghasilkan upah ataupun bayaran.

Disatu sisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, menjelaskan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata. Wisata merupakan suatu kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata. Sedangkan wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata (Yoeti, 1997:194). Pada garis besarnya, definisi tersebut menunjukkan bahwa kepariwisataan memiliki arti keterpaduan yang di satu sisi diperani oleh faktor permintaan dan faktor ketersediaan. Faktor permintaan terkait oleh permintaan pasar wisatawan domestik dan mancanegara. Sedangkan faktor ketersediaan dipengaruhi oleh transportasi, atraksi wisata dan aktifitasnya, fasilitas-fasilitas, pelayanan dan prasarana terkait serta informasi dan promosi (Hadwin, 2013).

3. Pariwisata Berkelanjutan

Pembangunan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism development*) berlandaskan pada upaya pemberdayaan (*empowerment*), baik dalam arti ekonomi, sosial, maupun kultural merupakan suatu model pariwisata yang mampu merangsang tumbuhnya kualitas sosio-kultural dan ekonomi masyarakat serta menjamin kelestarian lingkungan. Menurut Yoeti (2008:242), pariwisata

berkelanjutan adalah mempertemukan kebutuhan wisatawan dan daerah tujuan wisata dalam usaha menyelamatkan dan memberi peluang untuk menjadi lebih menarik lagi di waktu yang akan datang.

Hal ini merupakan suatu pertimbangan sebagai ajakan pemerintah agar semua sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan di waktu yang akan datang untuk tujuan ekonomi, sosial, keindahan yang dapat dijadikan daya tarik dengan memelihara integritas keanekaragaman budaya yang ditunjang dengan sistem kehidupan yang ada.

Ide dasar pembangunan berkelanjutan adalah kelestarian sumber daya alam dan budaya. Sumber daya tersebut merupakan kebutuhan setiap orang saat sekarang supaya dapat hidup dengan sejahtera, tetapi harus dipelihara dan dilestarikan agar dapat jga digunakan di masa yang akan datang. Pemanfaatan sumber daya tersebut harus melibatkan masyarakat lokal dan memberikan manfaat optimal bagi mereka.

Sedangkan Menurut Weber dalam Damanik (2006:26),mengartikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan sumber daya (atraksi, aksesibilitas, amenitas) pariwisata yang bertujuan untuk memberikan keuntungan optimal bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*)dan nilai kepuasan optimal bagi wisatawan dalam jangka panjang.

Adapun prinsip pariwisata berkelanjutan menurut WTO dalam Hardjasoemantri (2002: 82), dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Sumber daya alam, historis, budaya dan lain-lain untuk kepariwisataan dikonservasi untuk pemanfaatan berkesinambungan di masa depan, dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekarang.
- b. Pengembangan kepariwisataan direncanakan dan dikelola sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan masalah lingkungan dan sosio kultural yang serius di wilayah wisata.
- c. Kualitas lingkungan yang menyeluruh di wilayah wisata dipelihara dan ditingkatkan dimana diperlukan.
- d. Kepuasan wisatawan yang tinggi dipertahankan sehingga daerah tujuan wisata akan tetap memiliki daya jual dan popularitasnya.
- e. Manfaat kepariwisataan terlebas luas di seluruh masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka untuk mencapai tujuan pariwisata yang berkelanjutan, baik secara ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan pengelola wajib melakukan manajemen sumber daya yang efektif.

Values atau nilai-nilai yang harus dipertimbangkan menyangkut konsumen, budaya dan warisan budaya, ekonomi, ekologi, finansial, sumber daya manusia, peluang masa depan dan sosial. Menurut Pitana dan Diarta (2009: 86), tujuan dari pengelolaan atau manajemen pariwisata adalah untuk menyeimbangkan pertumbuhan dan pendapatan ekonomi dengan pelayanan kepada wisatawan serta perlindungan terhadap lingkungan dan pelestarian keberagaman budaya.

Tabel 2.1.

Indikator untuk Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

No	Indikator	Ukuran Spesifik
1	Perlindungan lokasi	Daya dukung, tekanan terhadap area dan kemenarikan
2	Tekanan	Jumlah wisatawan yang berkunjung pertahun/bulan/masa puncak
3	Intensitas pemanfaatan	Intensitas pemanfaatan pada waktu puncak (wisatawan/ha)
4	Dampak sosial	Rasio antara wisatawan dan penduduk lokal (pada waktu puncak/rata-rata)
5	Pengawasan pembangunan	Adanya prosedur secara formal terhadap pembangunan di lokasi dan kepadatan pemanfaatan
6	Pengelolaan limbah	Presentase limbah terhadap kemampuan pengelolaan. Demikian pula terhadap rasio kebutuhan dan suplai air bersih
7	Proses perencanaan	Mempertimbangkan perencanaan regional termasuk perencanaan wisata (regional)
8	Ekosistem kritis	Jumlah spesies yang masih jarang dan dilindungi
9	Kepuasan pengunjung	Tingkat kepuasan pengunjung berdasarkan pada kuisisioner
10	Kepuasan penduduk local	Tingkat kepuasan penduduk lokal berdasarkan kuisisioner
11	Kontribusi pariwisata terhadap ekonomi lokal	Proporsi antara pendapatan total dengan pariwisata

Sumber : WTO (1994) dalam Pitana dan Diarta (2009: 88)

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam pengelolaan pariwisata diperlukan keterlibatan semua pemangku kepentingan di bidang pariwisata untuk mengintegrasikan kerangka partisipasi masyarakat. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah staf dari industri pariwisata, konsumen, investor dan developer, pemerhati dan penggiat warisan dan pelestari budaya, pemerintah, dan pelaku ekonomi lokal dan nasional. Pemangku kepentingan tersebut, memiliki harapan dan nilai yang berbeda yang perlu dikelola sedemikian rupa agar diadopsi dan terwakili dalam perencanaan, pengembangan, dan operasionalisasinya.

Menurut Cox dalam Dowling dan Fannel (2003: 2), manajemen pariwisata harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada kearifan lokal dan *special local sense* yang merefleksikan keunikan peninggalan budaya dan keunikan lingkungan.
- 2) Preservasi, proteksi dan peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi basis pengembangan kawasan pariwisata.
- 3) Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada khasanah budaya lokal.
- 4) Pelayanan kepada wisatawan yang berbasis keunikan budaya dan lingkungan lokal.
- 5) Memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan dan pengembangan pariwisata jika terbukti memberikan manfaat positif, tetapi sebaliknya mengendalikan dan/ atau menghentikan aktivitas pariwisata tersebut.

4. Upaya Pelestarian Lingkungan Obyek Wisata

Sebagaimana diketahui bahwa dalam upaya melestarikan tempat wisata agar tetap terjaga maka perlu dilakukan usaha-usaha yang berkaitan dengan terciptanya daya dukung lingkungan obyek wisata, yang akan selalu memberikan kenyamanan kepada wisatawan. Dalam hal ini, sebisa mungkin pengelola harus senantiasa bekerjasama dengan para pengunjung dan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap keberlangsungan obyek wisata.

Ada tiga faktor menurut Soekadijo (1996:269) yang dapat menentukan berhasilnya pembangunan pariwisata sebagai industri. Ketiga faktor tersebut adalah:

- a. Tersedianya obyek dan atraksi wisata yaitu segala sesuatu yang menjadi daya tarik bagi orang untuk mengunjungi suatu daerah tujuan wisata. Misalnya: keindahan alam, hasil kebudayaan, kesenian adat istiadat, tata cara hidup suatu masyarakat, dan lain-lain sebagainya.
- b. Adanya fasilitas *accessibility*, yaitu prasarana dan sarana perhubungan dengan segala fasilitasnya, sehingga memungkinkan para wisatawan mengunjungi suatu daerah tujuan wisata tertentu.
- c. Tersedianya fasilitas *amenities*, yaitu sarana kepariwisataan yang dapat memberikan pelayanan pada wisatawan selama dalam perjalanan wisata yang dilakukan baik didalam negeri maupun diluar negeri.

5. Pengelolaan Pariwisata Konvensional

Model pengelolaan pariwisata yang dilakukan oleh Pemerintah daerah melalui implementasi model pengelolaan konvensional, masalah dengan banyak

mengandung dan mengikutsertakan investor swasta, bahkan asing, perlindungan yang berlebihan terhadap sektor swasta, banyak mengeluarkan izin pengelolaan yang bersifat eksklusif, sehingga sangat jauh dari jangkauan masyarakat lokal telah menimbulkan persoalan dan dampak sosial, ekonomi serta lingkungan yang merugikan bagi komunitas lokal. Hasilnya, sama sekali belum terlihat dan menyentuh kesejahteraan masyarakat. Kondisi dilematis nampaknya dirasakan pemerintah daerah. Disatu sisi berusaha, ada keinginan pemerintah daerah untuk menaikkan pendapatan asli daerahnya, sehingga menjadikan sektor pariwisata sebagai *leading sector* dalam capaian peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), namun disisi lain, diakui pula kerjasama ekonomi yang telah dilakukan tidak mampu menyelesaikan persoalan kemiskinan, keberdayaan serta ketertinggalan yang dirasakan oleh komunitas (Tresiana dan Duadji, 2017).

Urgensi pentingnya pengelolaan pariwisata berbasis komunitas, mengingat model ini menyusun prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) demi pencapaian pendistribusian kesejahteraan rakyat secara merata. Komunitas lokal diharapkan dapat menolak jika ternyata pengelolaan yang dilakukan tidaklah sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Konteks pariwisata berbasis komunitas, tidak berarti merupakan upaya kecil dan lokal semata, tetapi perlu diletakkan dalam konteks kerjasama masyarakat secara global.

Pemerintah daerah perlu melakukan kajian berbagai kebijakan, sistem strategi kelembagaan, dan proram pengelolaan pariwisata yang sedang berjalan. Apakah hasil yang dicapai oleh kebijakan, strategi kelembagaan, dan proram telah

memenuhi harapan masyarakat dalam komunitas dan apakah perlu didesain ulang untuk mendapatkan kualitas hasil yang lebih baik (*thinking again*).

Untuk ketercapaian itu, maka diperlukan penguatan institusi/kelembagaan lokal, yang mampu membangun interaksi dan networking, sinergitas dan menjadi mediasi berbagai *stakeholders*, sehingga kedepan hasilakan muncul pilihan model pengelolaan pariwisata yang berintegritas, tidak berjalan sendiri-sendiri dan terpisah, dengan kekuatan besar ada di komunitas. Kelembagaan lokal, diharapkan akan menjadi pilihan inovasi bagi perbaikan kebijakan, strategi kelembagaan, dan proram bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah setempat (Tresiana dan Duadji, 2017).

Tabel 2.2.

Orientasi Dan Harapan Masyarakat Dalam Kepemilikan Aset Pengelolaan
Pariwisata Teluk Kiliun

Unsur Pengelola	Fungsi	Orientasi
Pranata kelembagaan lokal	Melibatkan pranata kemasyarakatan lokal sebagai pengelola utama, sedangkan pemerintah dan pelaku pariwisata sebagai mitra. Semua yang terliabat saling melengkapi kekurangan masing-masing mitra sehingga pengelolaan menjadi satu kesatuan yang utuh dan terpadu.	Berbasis masyarakat

	<p>Dalam konteks ini terjadi pemberdayaan masyarakat melalui pranata kemasyarakatan lokal. Kelemahan unsur pengelolaan ini adalah pranata kemasyarakatan lokal yang lemah dan pengelolaan pariwisata.</p>	
<p>Pelaku pariwisata</p>	<p>Pelaku pariwisata sebagai pengelola utama, sedangkan masyarakat dan pemerintah menjadi mitra kerja. Kelemahannya masyarakat dijadikan objek komodifikasi, pemberdayaan masyarakat relatif sedikit, dan adanya potensi konflik antara pelaku pariwisata dan masyarakat.</p>	<p>Bisnis</p>
<p>Pemerintah</p>	<p>Pengelolaan dapat berwujud badan usaha milik negara. Kelemahannya, partisipasi masyarakat terbatas, keuntungan yang dinikmati masyarakat rendah, dan masyarakat sukar melakukan kontrol.</p>	<p>Struktural</p>

Badan pengelola	Mengetengahkan perpaduan antara pranata kemasyarakatan lokal, pelaku pariwisata dan pemerintah. Semua unsur terlibat dalam pengelolaan pariwisata berdasarkan peranannya masing-masing yang disepakati bersama.	Profesionalitas dan kemitraan
-----------------	---	-------------------------------

Sumber :Tresiana dalam Duadji, (2017)

Agar pariwisata dapat berkelanjutan, maka isu kepemilikan pengelolaan pariwisata menjadi isu yang strategis. Ada beberapa model kepemilikan faktor produksi, yang masing-masing model dapat berdiri sendiri ataupun digabungkan satu dengan lainnya sesuai dengan harapan dan karakteristik masyarakat. Hasil penelitian menggambarkan implementasi masing-masing model haruslah mengedepankan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat (Tresiana dan Duadji, 2017).

D. Kerangka Pikir

Secara umum pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan seseorang untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan suatu perencanaan bukan maksud untuk mencari nafkah ditempat yang dikunjunginya, tetapi semata-mata untuk rekreasi atau memenuhi keinginan beraneka ragam. Pengelolaan pariwisata pantai Dato Kabupaten Majene harus diperhatikan terkhususnya masyarakat disekitar pantai Dato Kabupaten Majene melalui pendekatan-pendekatan partisipasi masyarakat serta bentuk-bentuk partisipasi masyarakat agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Berdasarkan uraian dari kerangka maka untuk melihat penelitian ini lebih jelas, berikut penulis mencoba menggambarkan alur penelitian seperti yang tampak dibawah ini :

Partisipasi Komunitas Lokal

Bentuk-Bentuk Partisipasi	Pendekatan-Pendekatan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi Buah Pikiran 2. Partisipasi Tenaga 3. Partisipasi Harta Benda 4. Partisipasi Keterampilan Dan Kemahiran 5. Partisipasi Sosial 	<p style="text-align: center;">Partisipasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi Pasif dan Pelatihan Informasi 2. Sesi Partisipasi Aktif 3. Partisipasi Dengan Keterikatan 4. Partisipasi Atas Permintaan Setempat

Peningkatan Partisipasi

Komunitas Lokal Dalam

Pengelolaan Pariwisata Pantai

Gambar 2.1

E. Fokus Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir di atas, maka fokus penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka, adapun fokus penelitian yang berpijak dari rumusan masalah. Fokus penelitian ini terdiri dari beberapa hal pokok yang perlu diuraikan yaitu: Bagaimana partisipasi komunitas lokal dalam pengelolaan pariwisata pantai Dato kabupaten Majene.

F. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Partisipasi adalah suatu konsep sentral, dan prinsip dasar dari pengembangan masyarakat. serta saling bekerja sama baik itu Pemerintah Daerah, masyarakat serta komunitas lokal yang terkait. untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada dalam bidang pariwisata pantai Dato kabupaten Majene.
2. Komunitas lokal adalah masyarakat yang bermukim atau mencari nafkah di sekitar pabrik, kantor, tempat pelatihan atau di sekitar pantai Dato kabupaten Majene.
3. Pengelolaan pariwisata sebagai suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya di pantai Dato kabupaten Majene.
4. Bentuk partisipasi adalah macam-macam sumbnagan yang diberikan seseorang atau masyarakat yang ikut berpartisipasi di pantai Dato kabupaten Majene.

5. Pendekatan partisipasi adalah sebuah keinginan yang dilakukan seseorang atau masyarakat dalam ikut serta berpartisipasi di pantai Dato kabupaten Majene.
6. Partisipasi buah pikiran adalah sebuah masukan atau ide yang diberikan masyarakat dalam berpartisipasi di pantai Dato kabupaten Majene.
7. Partisipasi tenaga adalah keikutsertaan masyarakat dalam berkontribusi/gotong royong dalam berpartisipasi di pantai Dato kabupaten Majene.
8. Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk materi untuk membantu memajukan pariwisata di pantai Dato kabupaten Majene.
9. Partisipasi keterampilan dan kemahiran adalah tidak dalam bentuk materi melainkan dalam bentuk ekonomi kreatif di pantai Dato kabupaten Majene.
10. Partisipasi sosial adalah partisipasi dalam bentuk keinginan dalam hati serta menyadari bahwa harus dapat memajukan pariwisata di pantai Dato kabupaten Majene.
11. Partisipasi pasif adalah bentuk dukungan pemerintah dalam menjalankan aturan tentang pariwisata di pantai Dato kabupaten Majene.
12. Sesi partisipasi aktif adalah seseorang atau masyarakat aktif dalam memajukan pariwisata di Pantai Dato kabupaten Majene.
13. Partisipasi keterikatan adalah partisipasi yang diikat oleh regulasi/aturan yang ada baik dari pemerintah maupun swasta di pantai Dato kabupaten Majene.

14. Partisipasi permintaan setempat adalah seseorang, kelompok, dan masyarakat yang ikut berpartisipasi atas dasar permintaan dari pihak tertentu di pantai Dato kabupaten Majene.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini selama 2 bulan dilaksanakan setelah seminar proposal. Lokasi penelitian dilaksanakan di dua tempat yaitu di Dinas Pariwisata Kabupaten Majene dan di Pantai Dato Kabupaten Majene dengan tujuan untuk melihat sejauh mana Partisipasi Komunitas Lokal Dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Dato.

Alasan pemilihan lokasi ini didasarkan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Majene Dan Pantai Dato Majene merupakan salah satu unsur pemerintah di tingkat Kabupaten yang menangani sistem pengelolaan kepariwisataan.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berkaitan dengan tujuan penelitian adalah untuk memberikan gambaran mengenai Partisipasi Komunitas Lokal Dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Dato Kabupaten Majene yang terjadi secara obyektif, maka jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan tentang ruang lingkup dan proses pengelolaan pariwisata Pantai Dato Kabupaten Majene.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah fenomenologi dimaksudkan untuk memberi gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman yang dialami oleh informan.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan penulis melalui pengamatan langsung (observasi), dan wawancara yang dilakukan penulis tentang Partisipasi Komunitas Lokal Dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Dato Kabupaten Majene.
2. Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan peneliti dari berbagai informasi tertulis seperti, laporan dan dokumen tentang pengelolaan dan arah kebijakan pantai Dato yang digunakan dalam penelitian mengenai Partisipasi Komunitas Lokal Dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Dato Kabupaten Majene.

D. Informan Penelitian

Teknik penentuan informan dilakukan secara *purposive* yaitu sengaja memilih orang-orang yang dianggap paling mengetahui dan dapat memberikan informasi sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari:

Tabel 3.1

Informan Penelitian dan Posisi/Jabatan

No.	NAMA INFORMAN	INISIAL	POSISI/JABATAN	JUMLAH
1.	Muh. Daali	MD	Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	1
2.	Huldia Abd. Rasjid	HAR	Kepala Seksi Pengembangan Kemitraan dan Kerjasama Pariwisata	1
3.	Hasan	HN	Ketua Kelompok Sadar Wisata, POKDARWIS (Komunitas Lokal)	1
4.	Lina, Hamsah, Rini, Fifi, Mulyadi	LN, HS, RN, FF,MI	Masyarakat	5
TOTAL				8

E. Teknik Pengumpulan Data

Gunamemperoleh data yang relevandengantujuanpenelitian, makadigunakanteknikpengumpulan data sebagaiberikut:

1. Observasi

Penelitimelakukanpengamatanlangsungkelapanganmengenaipartisipasi komunitas lokal dalam pengelolaan pariwisata pantaiDato. Serta bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dan pendekatan-pendekatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata pantai Dato Kabupaten Majene.

2. Wawancara

Penelitimelakukanwawancaralangsungsecaramendalamkepadainforman yang menjadi objekdaripenelitianiniyaitu Dinas Parawisata Kabupaten Majene, komunitas lokal pantai Dato Kabupaten Majene, Masyarakat sekitar pantai Dato Kabupaten Majene. Adapun wawancarainibertujuanuntukmemperolehinformasipenelitianmengenai partisipasi komunitas lokal dalam pengelolaan pariwisata pantai Dato kabupaten Majene. Serta bentuk-bentuk dan pendekatan-pendekatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata pantai Dato Kabupaten Majene.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yangdiperlukandalampenelitianinimeliputi data pegawai, struktur organisasi, data potensi wisata dan arah kebijakan pantai Dato serta pengelolaan pantai Dato, baik pada Dinas Pariwisata Kabupaten Majene

maupun di pantai Dato Kabupaten majene. Serta data-data potensi obyek wisata khususnya pantai Dato Kabupaten Majene.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengelola data dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Dalam Model ini terdapat 3 (tiga) komponen pokok. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:92-99) ketiga komponen tersebut yaitu:

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan makin lama peneliti di lapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

2. Data Display (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan,

hubungan antar kategori dan jenisnya. Selain dalam bentuk naratif, display data dapat juga berupa grafik, matriks, *network* (jejaring kerja).

3. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila data kesimpulan data yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh kembali bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Keabsahan Data

Salah satu cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengujian kredibilitas data adalah dengan triangulasi. Menurut Sugiyono (2012:125) Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Lebih lanjut Sugiyono (2012:127) membagi triangulasi ke dalam tiga macam, yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada.

Kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi yang ada. Dengan kata lain triangulasi sumber adalah langkah pengecekan kembali data-data yang diperoleh dari informan dengan cara menanyakan kebenaran data atau informasi.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan wawancara,

lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.

Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-

ulangsehinggasampaiditemukankepastiandatanya.Triangulasidapatjugadilaku
kandengancaramengecekhasilpeneitian, daritimpeliteli lain yang
diberitugasmelakukan pengumpulan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Majene

Kabupaten Majene adalah kabupaten tertua dari 6 kabupaten di provinsi sulawesi barat dengan luas wilayah 947, 84 km², jumlah penduduk 169.72 jiwa terdiri dari 8 kecamatan dan 82 desa/kelurahan.kabupaten majene,memiliki 85 sungai-sungai kecil menjadi sumber air bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih.

Dari aspek topografi, Kabupaten Majene memiliki wilayah yang kondisinya relatif bervariasi yakni, pada sisi selatan merupakan daerah pesisir yang relatif datar sedangkan pada sisi utara merupakan daerah pegunungan,luas wilayah yang memiliki kemiringan 0-10% adalah 125,72 km² sedangkan sisanya memiliki kemiringan lebih besar dari 10%. Ibu kota kabupaten terletak di kecamatan banggae yang luas perkotaan 5.515 km berada di posisi selatan Kabupaten Majene, jarak dari ibu kota provinsi sekitar 120 km dengan waktu tempu 3 hingga 4 jam.

Adapun yang menjadi strategi pembangunan pariwisata perencanaan di Kabupaten Majene yaitu;

1. Revisi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah(Ripparda) Tahun 2007.

2. Menyusun Rencana Induk Pengembangan Objek Wisata (Ripow), Kajian dan Penelitian Pariwisata.
3. Membentuk dan menetapkan regulasi.
4. Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata ramah lingkungan.
5. Pelibatan masyarakat lokal dalam perencanaan.
6. Pemberdayaan kelompok masyarakat (Pokdarwis).
7. Menggugah prakarsa dan aspirasi masyarakat sekitar objek.
8. Penyediaan informasi akurat melalui teknologi informasi center (TIC)
9. Meningkatkan kordinasi stakeholder.
10. Melaksanakan konsultasi publik.
11. Menganalisis potensi dan hambatan.

Selanjutnya dalam tahap pengembangan Pariwisata Kabupaten Majene di Fokuskan pada langkah berikut;

1. Pendataan identifikasi objek dan daya tarik wisata.
2. Pemetaan kawasan objek dan daya tarik wisata.
3. Penetapan kawasan tematik melalui analisis SWOT.

Untuk itu dalam proses menjaga konsistensi pembangunan di Kabupaten Majene maka dibuatlah tahap-tahap pembangunan dengan berdasarkan pada potensi sebagai berikut:

1. Pembangunan potensi wisata jangka pendek.
2. Pembangunan potensi jangka menengah.
3. Pembangunan potensi jangka panjang.

Adapun Prestasi Pembangunan Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Majene yang telah diraih yaitu;

1. Penetapan Badik, Passayang-Sayang dan Sandeq sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia pada tanggal 17 Oktober 2014 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
2. Penetapan Kabupaten Majene sebagai Kawasan Pembangunan Pariwisata Nasional (KPPN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional(Ripparnas) Tahun 2010-2025.
3. Yokatta News Kerjasama Deputi Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata Republik Indonesia memberikan Penghargaan “Yokatta Wonderful Indonesia Tourism Award 2018 kepada Pemerintah Kabupaten Majene sebagai Daerah Terbaik 1 yang memiliki Komitmen, Inovasi dan Performance dalam memajukan pariwisata daerah.

TABEL 4.1

Tabel Data Desa Wisata Kabupaten Majene;

No.	DESA WISATA	LOKASI	KETERANGAN
1	Baurung	Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur	Desa Binaan
2	Labuang	Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur	Desa Binaan
3	Pangali-Ali	Kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae	Desa Binaan
4	Bonde	Desa Bonde Kecamatan Pamboang	Desa Binaan

5	Mosso	Kelurahan Mosso Kecamatan Sendana	Desa Binaan
6	Binanga	Desa Binanga Kecamatan Sendana	Desa Binaan
7	Tallu Banua	Desa Tallu Banua Utara Kecamatan Sendana	Desa Binaan
8	Mekkatta	Desa Mekkatta Kecamatan Malunda	Desa Binaan

Sumber Data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene

Berdasarkan tabel data desa wisata diatas menunjukkan bahwa ada delapan desa wisata di Kabupaten Majene yang sementara dikelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang tergolong dalam desa binaan. Kedepannya desa wisata ini akan dikelola baik dari segi pengelolaannya maupun dari perkembangan desa binaan yang ada di Kabupaten Majene.

Tabel 4.2

Tabel Data Usaha Pariwisata Kabupaten Majene:

No.	KECAMATAN	HOTEL	RESTORAN	TRAVEL AGET	PONDOK WISATA	RUMAH BERNYANYI
1	Banggae	2	17	2	-	1
2	Banggae Timur	9	25	2	5	5

3	Pamboang	-	8	-	-	-
4	Sendana	-	13	-	-	-
5	Tammero'do	-	6	-	-	1
6	Tube Sendana	-	5	-	-	-
7	Malunda	3	12	-	-	-
8	Ulumanda	-	3	-	-	-
JUMLAH		14	89	4	5	7

Sumber Data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene

Berdasarkan tabel data usaha pariwisata diatas menunjukkan bahwa usaha pariwisata yang ada di delapan kecamatan di Kabupaten Majene hanya tiga kecamatan yang memiliki hotel/penginapan. Dengan demikian dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata akan lebih mengoptimalkan usaha pariwisata yang ada di Kabupaten Majene.

Tabel 4.3

Data Cagar Budaya/Situs Kabupaten Majene:

NO.	KECAMATAN	FUNGSI UTAMA	JUMLAH
1	Banggae	Pemakaman,Gedung, Pendaratan,Sarana Penampungan,Rumah Kediaman,Kantor Tansi Benteng,Tempat Ibadah,Menara	28
2	Banggae	Pemakaman,Monumen	13

	Timur		
3	Pamboang	Pemakaman,Benteng,Kolam	5
4	Sendana	Pemakaman,Situs,Tempat Upacara,Tanda Kekuatan	19
5	Tammero'do	Pemakaman	7
6	Tubo Sendana	Pemakaman	6
7	Malunda	Pemakaman,Tapail Batas,Perjanjian	9
8	Ulumanda	Permandian	1
TOTAL			88

Sumber Data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene

Berdasarkan data cagar budaya diatas terdapat delapan kecamatan yang ada di Kabupaten Majene yang memiliki cagar budaya dan yang paling banyak cagar budaya terdapat di kecamatan Banggae sebanyak dua puluh delapan. Kedepannya cagar budaya yang terdapat di masing-masing kecamatan ini akan lebih dikembangkan sebagai warisan nenek moyang serta menjadi daya tarik wisatawan untuk lebih mengenal Kabupaten Majene sebagai wilayah pelestarian budaya.

Tabel 4.4

Data Usaha Milik Kelompok Masyarakat (UMKM) Sektor Pariwisata Kabupaten Majene.

No.	NAMA USAHA	JENIS USAHA	ALAMAT
-----	------------	-------------	--------

1	Madinah	Kuliner	Tangnga-Tangnga
2	Mila	Kuliner	Labuang
3	Mekar Sari	Kuliner	Tg.Batu Barat
4	Nurhidayah	Pengrajin	Tg.Batu Barat
5	Bunga Koda'	Tenun Sutera	Luaor
6	Olang Mesa'	Pengrajin	Luaor
7	Muttia Sendana	Kuliner	Binanga
8	Limbua Indah	Kuliner	Lakka'ding
9	Marannu	Kuliner	Tappa'galung
10	Khaerunnisa Cake	Pengrajin	Tappa'galung
11	Barane Beach	Kuliner	Baurung
12	Siamesai	Kuliner	Mekkatta
13	Rumah Seni	Pengrajin	Baruga Dhua
14	Dapur Samaratanna	Kuliner	Tube Tengah
15	Dato Indah	Kuliner	Pangale

16	Cafe Abo'	Kuliner	Baurung
17	Cafe Rahmah	Kuliner	Baurung
18	Elo' Puang	Kuliner	Pangale

Sumber Data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene

Berdasarkan tabel usaha kelompok milik masyarakat terdapat usaha-usaha yang dilakukan masyarakat mulai dari kuliner, pengrajin, dan tenun sutera sebagai keikutsertaan masyarakat dalam proses pengembangan pariwisata di Kabupaten Majene. Disisi lain usaha kelompok ini telah terdaftar di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene dan akan dilakukan pembinaan sesuai dengan porsinya.

2. Gambaran Umum Kantor Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Majene

Terbentuknya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene sebelumnya telah beberapa kali mengalami perubahan, dimana pada awalnya berbentuk Kantor Pariwisata pada tahun 1999 sampai tahun 2000, setelah itu Kantor Pariwisata kemudian berubah bentuk menjadi Dinas Pariwisata di peralihan tahun 2001. Seiring bergulirnya waktu Pemerintah Kabupaten majene melakukan perombakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di tahun 2002, dan Dinas Pariwisata kemudian mengalami perubahan menjadi Dinas Priwisata Informasi dan Komunikasi (Parinkom) sampai di tahun 2008.

Pada tahun 2009 di Era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) Dinas Pariwisata Informasi dan Komunikasi berganti lagi dengan nama Disporabudpar Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata. Sampai tahun 2016, kemudian pada Era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (JOKOWI) banyak kebijakan-kebijakan baru yang diambil dan berdampak berubahnya Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan

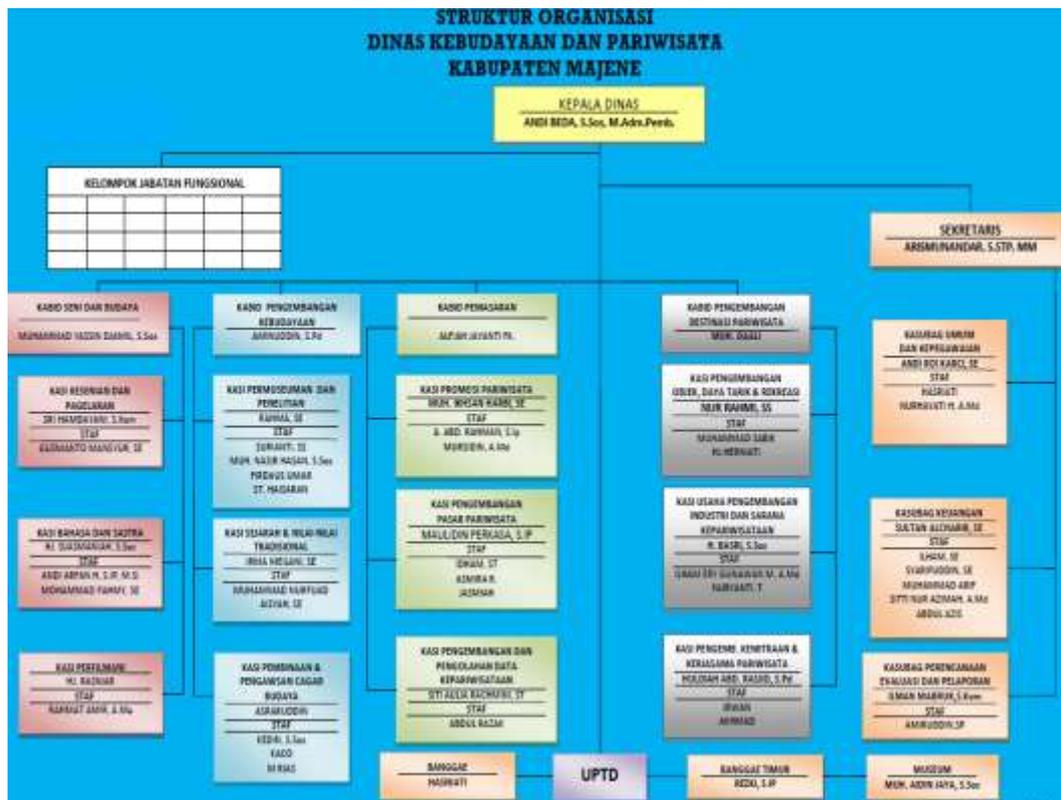
dan Pariwisata(Disporabudpar) Kabupaten majene menjadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene (Disbudpar) di tahun 2017 sampai sekarang .

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene merupakan unsur pelaksanaan pemerintah dibidang kebudayaan dan Pariwisata yang bertanggungjawab kepada Bupati Majene melalui Sekretaris Daerah .Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majene dan Peraturan Bupati Majene (Perbup) Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Majene, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata.

3. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene Tahun

2018;



Gambar 4.2

Berikut susunan organisasi dinas kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan bagan diatas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Seni Budaya;
 1. Seksi Perfilman.
 2. Seksi Kesenian dan Pagelaran.
 3. Seksi Bahasa dan Sastra.

- d. Bidang Pengembangan Kebudayaan;
 - 1. Seksi Permuseuman dan Penelitian.
 - 2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Cagar Budaya.
 - 3. Seksi Sejarah dan Nilai-nilai Tradisional.
- e. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
 - 1. Seksi Pengembangan Objek, Daya Tarik Wisata dan Rekreasi.
 - 2. Seksi Pengembangan Industri dan Sarana Kepariwisataan.
 - 3. Seksi Pengembangan Kemitraan dan Kerjasama Pariwisata
- f. Bidang Pemasaran ;
 - 1. Seksi Promosi Pariwisata.
 - 2. Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata.
 - 3. Seksi Pengawasan dan Pengolahan Data Kepariwisataan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional;

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene mempunyai fungsi :

- 1. Perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan dan pariwisata;
- 2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan dan pariwisata yang meliputi kebudayaan dan kesenian, sarana wisata, objek wisata dan pemasaran wisata;
- 4. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan dinas;

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya .

4. Visi Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene

Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah **“Profesional, Produktif, Proaktif”**. Untuk memberikan kejelasan tentang makna yang terkandung dalam visi tersebut, maka Dinas Kebudayaan Pariwisata melaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan profesionalisme kinerja aparatur.
2. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam bidang kebudayaan pariwisata.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur sarana prasarana sektor kebudayaan dan pariwisata

5. Tata Kelola dan Daftar Kunjungan Pantai Dato Kabupaten Majene

Pantai Dato Majene adalah salah satu daya tarik wisata pantai di wilayah Sulawesi Barat dan wisata ini telah menjadi salah satu wisata andalan di Dusun Pangale Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat. atau kira-kira 7 km dari Kota Majene. Pantai dan Laut hingga saat ini masih menjadi obyek wisata andalan Kabupaten Majene baik sebagai komoditas pariwisata maupun sebagai sektor perekonomian..

Pantai Dato Majene ini memiliki keunikan dan keistimewaa sendiri berbeda dengan pantai-pantai lain di wilayah Pulau Sulawesi. Selain memiliki panorama alam pantai tropis yang indah, pantai ini juga tergolong masih alami dan terjaga dengan baik. Oleh karena itu, Pantai Dato Majene ini menjadi salah satu lokasi berwisata keluarga yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan terutama pada saat akhir pekan dan hari libur.

Pantai Dato Majene terbagi menjadi 2 bagian, yaitu pantai berpasir putih halus dan pantai beralaskan karang. Keberadaan tekstur pantai yang berkarang dan menjorok ke laut menambah pesona tersendiri bagi Pantai Dato Majene ini. Terdapat batu karang raksasa yang terhubung dengan tangga sehingga para pengunjung bisa naik ke atas dan bisa leluasa untuk menikmati pemandangan dari atas. Selain itu, di pantai ini juga terdapat batu karang berukuran besar yang terhubung dengan tangga, para pengunjung sering menaiki bukit karang pantai ini, meniti pinggiran tebing menuju puncak karang dengan ketinggian mencapai 20 meter dari permukaan air laut merupakan suatu tantangan yang sangat mengasyikkan. Dari puncak karang melongok kebawah sampai menembus permukaan air laut yang sangat jernih untuk melihat ikan yang bermain di antara terumbu karang.

Pantai Dato Majene ini memiliki laut yang biru dan jernih sehingga terlihat berbagai macam jenis ikan dari permukaan air. Lautnya pun cukup dangkal sehingga aman untuk berenang. Matahari terbenam di pantai ini berada di atas tebing yang membuat panorama di sore hari semakin indah dan menawan. Sunset inilah salah satu alasan kenapa banyak wisatawan yang datang ke pantai ini. Ketersembunyian Pantai Dato ini karena dikira kanannya terdapat bukit karang besar yang memisahkan dari garis pantai lainnya. Hal ini membuat keunikan tersendiri dan suasana lebih tenang, mungkin karena itu ada beberapa orang yang bercerita tentang suasana magis di pantai ini. Selain berenang, kita juga dapat bermain dengan keong-keong kecil dan indah berbagai ukuran dan warna yang banyak terdapat disebelah kiri pantai.

Untuk mengunjungi pantai ini dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan pribadi maupun memanfaatkan jasa penyewaan wisata. Jika melalui jalur darat dari

Makassar yang ditempuh dalam waktu 6 sampai 8 jam dengan tarif kendaraan umum Rp 70-100. Jalur lain bisa menggunakan pesawat udara Makassar-Mamuju lalu melanjutkan perjalanan darat kurang lebih 3 jam ke Majene dengan tarif kendaraan Rp 30.000-40.000. Kondisi jalan menuju lokasi wisata juga sudah dapat dikatakan baik dan mulus. Waktu yang diperlukan untuk mencapai kawasan wisata pantai Dato Majene ini adalah sekitar 15 menit jika berkendara dari Kota Majene. Perjalanan menuju lokasi wisata akan disambut dengan pemandangan sepanjang jalan yang didominasi oleh hutan atau kebun penduduk yang masih hijau asri.

Kawasan wisata ini kurang berkembang disebabkan informasi yang masih sangat minim serta kurang tereksplor keindahan wisata pantai Dato Majene ini. Selain itu, hal lain yang menyebabkan kurang berkembangnya wisata Pantai Dato Majene adalah sangat terbatasnya fasilitas yang disediakan di tempat wisata ini sehingga tidak dapat memenuhi apa yang diinginkan para pengunjung. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam kebutuhan wisatawan di antaranya adalah akomodasi/tempat tinggal, jasa boga dan restoran, transportasi dan jasa angkutan, atraksi wisata, cinderamata (souvenir).

Sementara itu yang terjadi di Pantai Dato Majene sangat terbatas baik dari segi akomodasi tempat tinggal, jasa boga dan restoran, transportasi dan jasa angkutan, atraksi wisata, cinderamata (souvenir). Untuk sekarang ini di kawasan wisata Pantai Dato Majene masih sedikit tempat penginapan bagi para wisatawan yang ingin bermalam di Pantai Dato Majene. Untuk mendukung kemajuan kawasan suatu wisata diperlukan fasilitas pendukung untuk menunjang kawasan wisata tersebut sehingga diperlukan sebuah revitalisasi kawasan Pantai Dato Majene yang kurang berkembang dan sangat kurang mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Majene. Ini di

karenakan saat ini pengembangan di Kawasan Pantai Dato masih dalam tahap pengembangan oleh pihak Dinas ataupun pihak-pihak yang terlibat.

Sangat disayangkan ditengah banyaknya potensi yang ada seperti Terumbu karang, pasir pantai yang putih dan halus, batu-batu yang berukuran besar, karang-karang besar yang indah dengan sarana pendukung untuk menikmati fasilitas yang ada di sana. Sudah seharusnya pemerintah Kabupaten Majene memperhatikan potensi besar yang dimiliki kawasan Pantai Dato Majene ini dan menjadikan tempat ini sebagai tujuan wisata yang menarik. Untuk membuat kawasan Pantai Dato Majene ini menjadi kawasan wisata yang menarik maka diperlukan suatu rencana untuk merevitalisasi kawasan ini. Rencana revitalisasi tersebut adalah menyediakan dan membangun unsur-unsur pendukung dalam sebuah pariwisata. Hal pertama yang dilakukan dalam merevitalisasi kawasan pantai Dato Majene ini adalah dengan membuat sebuah konsep wisata yang menarik dan melengkapi fasilitas- fasilitas yang dibutuhkan wisatawan serta giat membuat film- film documenter mengenai keindahan dan potensi yang dimiliki Pantai Dato Majene ini. Untuk mengatasi masalah akomodasi tempat tinggal disana akan dibangun penginapan- penginapan bagi wisatawan yang ingin bermalam. Pembangunan penginapan- penginapan ini menjadi potensi yang besar dan dapat menambah pendapatan serta membuka peluang bekerja bagi masyarakat sekitar Pantai Dato Majene sehingga diharapkan dengan penginapan yang bagus para wisatawan akan betah berlama-lama berwisata di Pantai Dato Majene ini. Selama ini para wisatawan yang datang dan ingin bermalam hanya terdapat penginapan yang sederhana dan belum dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang dapat memanjakan wisatawan.

Untuk lebih mengembangkan Daya tarik wisata Pantai Dato Majene ini akan disediakan juga peralatan untuk snorkling bagi wisatawan yang ingin menikmati

keindahan terumbu karang Pantai Dato Majene. Selain paket wisata snorkling di Pantai Dato Majene juga akan dibuat paket wisata wahana permainan air seperti banana boot, jetski dan lain-lain. Selain wahana permainan air juga akan dibuat wahan permainan untuk anak-anak seperti ATV dan Motor Trail kecil sehingga anak-anak dapat berkeliling mengitari pantai. Untuk ibu-ibu di Pantai Dato Majene sendiri akan dibina dan dibuatkan sebuah pelatihan untuk menambah pendapatan keluarga mereka. Ibu-ibu disana akan dibina untuk membuka warung makanan di sekitar pantai yang menyediakan makanan dan minuman yang khas daerah setempat. Selain membuat warung makanan ibu-ibu disana juga akan diajarkan bagaimana caranya membuat souvenir atau cinderamata untuk dijual kepada para wisatawan.

Begitulah rencana-rencana proses revitalisasi kawasan Pantai Dato Majene yang akan dilaksanakan. Tujuan dari revitalisasi kawasan Pantai Dato Majene ini adalah mengenalkan kepada orang-orang bahwa Pulau Sulawesi terutama di Kabupaten Majene juga memiliki pantai pasir putih yang indah serta terumbu karang yang indah dan berukuran raksasa yang memiliki potensi sangat besar menjadi wisata Pantai yang menarik dan khas di Sulawesi Barat.

Selain itu, tujuan dari revitalisasi kawasan ini adalah untuk menambah pendapatan daerah di sektor pariwisata dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar serta menambah pendapatan ibu-ibu di Pantai DatoMajene. Untuk masalah pengelolaan kawasan Pantai Dato Majene ini sepenuhnya akan diserahkan kepada masyarakat sekitar untuk mengelolanya dengan terlebih dahulu, masyarakat sekitar Pantai Dato Majene terlebih dahulu diberikan pelatihan-pelatihan oleh dinas terkait terutama dinas Pariwisata. Sehingga dengan adanya Revitalisasi ini memberikan dampak positif bagi mereka baik dari segi ekonomi, sosial maupun budaya dan masyarakat dapat

terlibat langsung dalam pengelolaannya dan tidak menjadi penonton di tempat mereka sendiri.

Tabel 4.5

Jumlah Kunjungan Wisatawan Setiap Tahunnya di Kabupaten Majene:

No.	WISATAWAN	2015	2016	2017	2018	KETERANGAN
1	Manca Negara	79	84	101	146	Eropa & Asia
2	Domestik	47.4 99	52.39 8	53.11 1	93.100	Nusantara & Lokal
	JUMLAH	47.5 78	52.48 2	53.21 2	193.24 6	

Sumber Data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene

Berdasarkan tabel jumlah kunjungan wisatawan diatas menunjukkan bahwa setiap tahun meningkat mulai dari tahun 2015 sampai 2018 baik dari manca negara maupun domestik. Kedepannya pengembangan pariwisata Kabupaten Majene akan terus dilakukan sebagai salah satu potensi destinasi wisata seperti pantai Dato Majene.

Tabel 4.6

Data Penerimaan Pajak dan Retribusi Pariwisata Daerah Kabupaten Majene:

No.	JENIS RETRIBUSI	TAHUN PENERIMAAN	TARGET	REALISASI	KET.
1	Tempat Rek.& Pariwisata	2015	138.850.500,-	143.735.500,-	Over Target
2	Tempat Rek.& Pariwisata	2016	139.500.000,-	157.447.000,-	Over Target
3	Tempat Rek.& Pariwisata	2017	140.000.000,-	148.180.000,-	Over Target
4	Tempat Rek.& Pariwisata	2018 (5-12-2018)	266.628.000,-	279.302.000,-	Over Target
5	Tempat Rek.& Pariwisata	2019	310.020.000,-	0,-	Over Target

Sumber Data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene

Berdasarkan data penerimaan pajak dan retribusi pariwisata Kabupaten Majene mengalami kenaikan/over target mulai dari 2015 sampai 2018, Dikarenakan objek wisata yang ada di Kabupaten Majene meningkat setiap tahunnya oleh karena itu pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene akan terus mengoptimalkan wisata-wisata yang ada di Majene sebagai salah satu objek wisata yang diberikan kepercayaan masuk dalam destinasi pariwisata nasional.

B. Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Dato di Kabupaten Majene.

1. Partisipasi Buah Pikiran

Partisipasi buah pikiran adalah yang diberikan masukan atau saran partisipasi dalam ajang sono, pertemuan atau rapat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata terkait masalah Partisipasi Buah Pikiran mengatakan :

“Partisipasi buah pikiran yang diberikan masyarakat itu ada dalam proses pengembangan destinasi pariwisata pantai dato contohnya memberikan masukan-masukan untuk pemerintah dalam tata kelola pantai dato, selain itu secara tidak langsung pemerintah juga terbantu dengan adanya masyarakat”.
(Hasil wawancara MD, 05 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat disimpulkan bahwa terkait dengan persoalan Partisipasi Buah Pikiran sangatlah dibutuhkan dalam membantu pemerintah dalam pengelolaan pariwisata pantai dato Kabupaten Majene. Dari segi masyarakat lokal memiliki beberapa partisipasi buah pikiran namun masi banyak masyarakat yang belum paham tentang tata kelola dalam persoalan manajemen serta pengelolaan pantai Dato Majene.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan berikutnya yaitu Kepala Seksi Pengembangan Kemitraan dan Kerjasama Pariwisata terkait Partisipasi Buah Pikiran mengatakan :

“Pemikiran atau saran yang diberikan masyarakat dalam keikutsertaannya dalam pengembangan partisipasi ada karena kita bisa lihat awal-awal sebelum anggaran kemitrian masuk mereka sudah antusia dalam proses pengembangan destinasi pariwisata pantai Dato Majene”. (Hasil wawancara HR,05 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat disimpulkan bahwa terkait dengan persoalan Partisipasi Buah Pikiran kesimpulan yang bisa kita ambil dalam wawancara ini adalah masyarakat punya kesadaran untuk meningkatkan potensi-potensi pariwisata pantai Dato Majene.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan berikutnya yaitu Ketua Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) yang biasa disebut Komunitas Lokal terkait Partisipasi Buah Pikiran mengatakan :

“Sebelum ditangani sama pemerintah sudah ada komunitas lokal yang mengelolah destinasi pantai Dato Majene, jadi dari segi partisipasi buah pikiran sudah ada sebelum pemerintah kelola, seiring berjalannya waktu pemerintah masuk untuk bekerja sama dengan komunitas lokal yang ada di pantai dato dan dibuatkan SK oleh Bapak Bupati Majene sebagai bukti resminya komunitas lokal ini dalam kerja sama antar pemerintah”. (Hasil wawancara HN, 06 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat disimpulkan bahwa terkait dengan persoalan Partisipasi Buah Pikiran dari masyarakat sudah ada sebelum pemerintah mengelolah pantai ini, karena sesuai dengan pernyataan komunitas lokal yang ada di pantai Dato. oleh karena itu komunitas lokal harus dapat bersinerji dengan pemerintah baik dari tata kelolanya maupun konsep manajemennya.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan berikutnya dengan masyarakat Pantai Dato terkait Partisipasi Buah Pikiran mengatakan :

“Pemerintah dan masyarakat sudah bekerja sama dengan baik dalam pengelolaan pariwisata pantai Dato Majene ini namun terkadang ada beberapa masyarakat entah itu masyarakat disini maupun pendatang sembarang membuang sampahnya jadi ketika itu terus terjadi lama-kelamaan pantai Dato Majene akan menjadi kotor, jadi untuk saran sebagai pengujung masyarakat atau pengujung harus punya kesadaran tentang kebersihan”. (Hasil wawancara LN, 06 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat disimpulkan bahwa terkait dengan persoalan Partisipasi Buah Pikiran terkait yang dikemukakan informan bahwa masyarakat juga harus punya kesadaran dalam kebersihan pantai Dato Majene.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan berikutnya yaitu masyarakat terkait Partisipasi Buah Pikiran mengatakan :

“Perkembangan pantai Dato sangat luar biasa bagi pemuda dan dinas pariwisata dengan banyaknya solusi dan bauh pikiran dalam pengembangan pantai Dato Majene, karena yang kita tahu bahwa pantai dato itu dulu sangat kotor, sebagai saran kedepannya baik dari komuitas lokal bekerja sama dengan pemerintah menyedikan buku-buku sebagai bahan perkenalan bahwa bukan hanya pantainya

dikenal tetapi dikenal dengan perkembangan literasinya". (Hasil wawancara HS,06 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat disimpulkan bahwa terkait dengan persoalan Partisipasi Buah Pikiran ada di Majene sebagai bahan pengembangan pantai Dato Majene dalam menarik wisatawan untuk berkunjung ke pantai Dato Majene.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan berikutnya yaitu masyarakat terkait Partisipasi Buah Pikiran mengatakan :

"Banyak partisipasi buah pikiran yang diberikan oleh masyarakat entah itu dari masyarakat umum maupun masyarakat disekitar pantai Dato Majene yang saya lihat,namun terkadang juga ada pengunjung yang tidak sadar akan kebersihan,jadi untuk saran kedepan masyarakat harus sadar tentang pentingnya kebersihan pantai Dato Majene". (Hasil wawancara RN,06 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat disimpulkan bahwa terkait dengan persoalan Partisipasi Buah Pikiran lebih kepada masyarakatnya bagaimana sadar akan kebersihan dalam menjaga kelestarian pantai Dato Majene.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan berikutnya masyarakat terkait Partisipasi Buah Pikiran mengatakan :

"Sudah banyak pemikiran yang diberikan saran dari masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan pantai ini,kita bisa lihat tata kelola yang diberikan masyarakat lokal dan pemerintah dan saya sendiri lumayan puas dengan adanya pengelolaan pantai Dato Majene ini, tetapi untuk saran kedepan agar pemerintah lebih mengembangkan pantai Dato agar lebih menarik lagi untuk pengujung". (Hasil wawancara FF,06 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat disimpulkan bahwa terkait dengan persoalan Partisipasi Buah Pikiran dari masyarakat memberikan dampak yang baik karena ada proses kerja sama antara pemerintah dan komunitas lokal dalam pengelolaan pariwisata pantai Dato.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan berikutnya yaitu masyarakat terkait Partisipasi Buah Pikiran mengatakan :

“Kalau partisipasi buah pikiran sudah banyak saya lihat yang diberikan dalam pengelolaan pariwisata ini entah dari masyarakat sekitaran pantai Dato maupun dari teman-teman komunitas lokal contohnya melaksanakan rapat tentang bagaimana dan seperti apa pengelolaan pantai Dato, kami biasanya saling memberikan masukan-masukan untuk pengelolaan pantai dato, ini berbicara partisipasi untuk pikiran mengelolah pantai dato itu selalu ada”. (Hasil wawancara ML,06 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat disimpulkan bahwa terkait dengan persoalan Partisipasi Buah Pikiran di pantai Dato Majene selalu ada dalam proses pengelolaannya, contohnya rapat bersama atau rembuk bersama tentang rencana-rencana pengelolaan pariwisata pantai Dato Majene.

Selanjutnya dapat disimpulkan terkait dengan aspek Partisipasi Buah Pikiran yang kemudian dikombinasikan dengan hasil observasi selama dilapangan dapat diketahui bahwa Partisipasi Buah Pikiran yang diberikan oleh masyarakat itu sudah ada sebelum pemerintah mengelolah pantai Dato Majene, dengan demikian masyarakat ataupun komunitas lokal sangatlah berperan penting dalam membantu pemerintah untuk proses pengembangan pariwisata pantai Dato Majene.

2. Partisipasi Tenaga

Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain, dan sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata terkait Partisipasi Tenagamengetakan bahwa :

“Partisipasi tenaga yang diberikan oleh masyarakat sudah ada namun belum terlalu optimal, karena kami juga dari pemerintah dinas pariwisata sangat memerlukan bantuan tenaga dalam pengelolaan pariwisata pantai Dato

Majene.oleh karnanya kami dari dinas pariwisata membutuhkan bantuan-bantuan yang bersifat tenaganya dari masyarakat secara umum dan terkhususnya secara khusus masyarakat sekitar pantai Dato Majene.”

(Hasil wawancara MD,06Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek Partisipasi Tenaga dapat disimpulkan bahwa partisipasi tenaga dari masyarakat sangatlah diperlukan oleh pemerintah setempat dalam hal ini dinas pariwisata Kabupaten Majene dalam memberikan tenaganya demi optimalnya prose pengelolaan pariwisata pantai Dato Majene.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni Kepala Seksi Pengembangan Kemitraan dan Kerjasama Pariwisata mengatakan bahwa :

“Dari segi partisipasi tenaga dari masyarakat memang ada namun belum sepenuhnya,kami mengharapkan ke depan dapat membantu pemerintah dalam pengembangan dan ikut serta memberikan tenaganya karna kami juga membutuhkan masyarakat untuk pengembangan serta pengelolaan pantai Dato Majene”.

(Hasil wawancara HR,06 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek Partisipasi Tenaga dapat disimpulkan bahwa partisipasi tenaga dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam membantu pemerintah setempat untuk pengembangan serta pengelolaan pariwisata pantai Dato Majene.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan berikutnya yaitu Ketua Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) yang biasa disebut Komunitas Lokal terkait Partisipasi Buah Pikiran mengatakan :

“Partisipasi tenaga di pantai Dato Majene sudah ada kami selalu lakukan bahkan sebelum pemerintah mengelolah ini pantai Dato kami sudah lakukan yang namanya partisipasi tenaga, dan sekarang kami dari komunitas lokal (Pokdarwis) sudah resmi bekerja sama dengan pemerintah melalui SK Bupati Majene”.

(Hasil wawancara HN,06 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait dengan aspek Partisipasi Tenaga dapat disimpulkan bahwa proses pengembangan pantai Dato masyarakat selalu memberikan partisipasi tenaga bahkan sebelum pemerintah mengelolah pantai Dato Majene masyarakat ataupun komunitas lokal telah memrikan partisipasi untuk pengembangan pariwisata pantai Dato Majene.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat mengatakan bahwa :

“Kalau partisipasi tenaga saya liat masyarakat sudah ikut serta untuk membantu pemerintah tapi tidak semua hanya beberapa masyarakat yang saya liat memberikan partisipasi tenaga contohnya masyarakat sekitaran pantai dan komunitas lokal yang ada di pantai Dato Majene”.

(Hasil wawancara LN,06 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait dengan aspek Partisipasi Tenaga dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah memberikan kontribusi tenaga dalam proses pengembangan pantai Dato Majene meskipun belum ikut semua dalam pengelolaan pariwisata pantai Dato Majene.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat pak Hamsah mengatakan bahwa :

“Partisipasi tenaga masyarakat sudah ada untuk pengembangan pantai Dato karena kami dari masyarakat lokal selalu ikut dalam pengembangan pariwisata pantai dato contohnya melakukan pembersihan pantai dan segala macamnya”.

(Hasil wawancara HS,06 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait dengan aspek Partisipasi Tenaga dapat disimpulkan bahwa partisipasi tenaga dari masyarakat selalu ada dalam pengembangan pariwisata Dato contohnya melakukan pembersihan disekitaran pantai.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat Rinimengatakan bahwa :

“Partisipasi tenaga masyarakat saya lihat sudah ada tapi perlu peningkatan dalam pengembangan pantai Dato Majene sangat diperlukan karna melihat kondisi pantai Dato masi memerlukan pembenahan-pembenahan untuk dapat di kenal sama masyarakat majene maupun pengunjung pantai Dato ”.
(Hasil wawancara RN,06 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek Partisipasi Tenaga dapat disimpulkan bahwa proses pengembangan pantai Dato sagat di perlukan untuk dapat berkembang sebagai pantai yang bisa dikenal oleh masyarakat secara umum.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat mengatakan bahwa :

“Biasa saya liat masyarakat membantu membersihkan pantai Dato Majene itu sudah masuk kontribusi tenaganya masyarakat dalam pengelolaan pantai Dato Majene”.
(Hasil wawancara FF ,06 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek Partisipasi Tenaga dapat disimpulkan bahwa selalu ada partisipasi tenaga yang diberikan oleh masyarakat ataupun komunitas lokal yang ada disekitar pantai Dato.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni Masyarakat mengatakan bahwa :

“Pantai Dato bagus sekali dikembangkan kami sebagai masyarakat lokal selalu ikut serta dalam pengelolaan pantai ini, melihat juga dari segi pantai jarang-jarang ada pantai seperti ini yang mempunyai terumbu karang serta pasir putih yang indah. jadi masalah partisipasi tenaga dari kami selalu memberikan tenaga dalam pengembangan pantai Dato ini ”.
(Hasil wawancara ML,06 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek Partisipasi Tenaga dapat disimpulkan bahwa sudah ada melihat juga dari segi pernyataan informan bahwa pantai Dato patut untuk dikembangkan sebagai salah satu objek wisata yang indah di Majene melihat beberapa keindahan-keindahan yang terkandung dalam pantai Dato ini

Selanjutnya dapat disimpulkan terkait dengan aspek Partisipasi Tenaga yang kemudian dikombinasikan dengan hasil observasi selama dilapangan dapat diketahui bahwa Partisipasi Tenaga yang diberikan oleh masyarakat lokal sudah ada namun belum terlalu optimal jadi kedepannya kita mengharapkan dalam proses pengembangan pariwisata pantai Dato Majene masyarakat selalu ikut serta dalam pengembangan maupun pengelolaan pantai Dato Majene.

3. Partisipasi Harta Benda

Partisipasi harta benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain, dan sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata terkait Partisipasi Harta Benda mengatakan bahwa :

“Berbicara partisipasi harta benda dari masyarakat belum ada karena dalam pengelolaan ini kita memakai dana dari kementerian untuk pengelolaan pantai Dato Majene ini.”

(Hasil wawancara MD,06Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek Partisipasi Harta Benda dapat disimpulkan bahwa belum ada untuk partisipasi harta benda dalam pengelolaan pariwisata pantai Dato Majene.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni Kepala Seksi Pengembangan Kemitraan dan Kerjasama Pariwisata mengatakan bahwa :

“Belum ada untuk partisipasi harta benda dari masyarakat dalam pengelolaan pantai Dato Majene kedepannya kami selaku pemerintah mengharapkan ada kontribusi dalam harta benda sebagai bentuk partisipasi penuh oleh masyarakat secara umum”.

(Hasil wawancara HR,06 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek Partisipasi Harta Benda dapat disimpulkan bahwa belum ada partisipasi masyarakat untuk harta benda kedepannya diharapkan masyarakat dapat membantu pemerintah dalam proses pengelolaan pariwisata pantai Dato Majene ini.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan berikutnya yaitu Ketua Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) yang biasa disebut Komunitas Lokal terkait Partisipasi Buah Pikiran mengatakan :

“Partisipasi harta benda belum ada dari masyarakat karena rata-rata disini orang yang membutuhkan juga kerjaan jadi mereka hanya bisa membantu dari segi partisipasi tenaga pikiran dll”.

(Hasil wawancara HN,06 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek Partisipasi Harta Benda dapat disimpulkan bahwa partisipasi harta benda untuk pengelolaan pantai Dato itu belum ada karena disekitar pantai Dato masyarakat rata-rata masih membutuhkan pekerjaan atau belum mampu untuk memberikan kontribusi harta benda.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat mengatakan bahwa :

“Partisipasi harta benda dalam masyarakat masih kurang karena melihat kondisi yang ada rata-rata masyarakat disekitaran pantai Dato ini memang belum ada yang nampak, disisi lain masyarakat disekitaran pantai rata-rata kurang perekonomian”

(Hasil wawancara RN,06 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait dengan aspek Partisipasi Harta Benda dapat disimpulkan bahwa dalam partisipasi harta benda belum ada karena melihat kondisi masyarakat lokal dari segi perekonomiannya.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat mengatakan bahwa :

“Partisipasi harta benda dari masyarakat belum ada untuk sampai sekarang dalam pengelolaan pariwisata pantai Dato, tetapi untuk partisipasi yang lain seperti partisipasi tenaga itu selalu dilakukan oleh masyarakat maupun komunitas lokal yang ada di Kabupaten Majene”.

(Hasil wawancara HS, 06 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait dengan aspek Partisipasi Harta Benda dapat disimpulkan bahwa belum ada partisipasi harta benda karena melihat kondisi masyarakat minim dalam konteks partisipasi harta benda.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat mengatakan bahwa :

“Peningkatan pantai Dato sangat diinginkan oleh masyarakat Majene sebagai objek wisata yang bisa dikenal untuk kalangan wisatawan daerah maupun luar daerah, untuk itu pemerintah dan masyarakat harus dapat bersinergi dalam proses pengembangan pantai Dato Majene kalau masalah partisipasi harta benda dari masyarakat belum ada karena masyarakat juga masih minim untuk partisipasi harta benda”.

(Hasil wawancara RN, 06 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait dengan aspek Partisipasi Harta Benda dapat disimpulkan bahwa melihat kondisi masyarakat mereka belum mampu untuk memberikan partisipasi harta benda, tetapi dari segi partisipasi yang lain masyarakat sudah melakukan.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat mengatakan bahwa :

“Pengelolaan pariwisata Dato sangat strategis untuk dikembangkan sebagai objek wisata nasional sesuai dengan penunjukan Kabupaten Majene dari Kementerian Majene masuk sebagai destinasi pariwisata nasional, untuk itu masyarakat serta pemerintah harus dapat memberikan kontribusi dalam pengelolaan pantai Dato. dan untuk partisipasi harta benda dari kalangan masyarakat yang saya tahu belum ada yang kita tahu bahwa untuk mengelolah pantai Dato sudah ada dana dari kementerian”.

(Hasil wawancara FF,06 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek Partisipasi Harta Benda dapat disimpulkan bahwa belum ada karena masyarakat juga sudah tahu bahwa untuk mengelolah pariwisata pantai Dato sudah ada dana dari kementerian.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat mengatakan bahwa :

“Partisipasi harta benda belum ada karna melihat kondisi masyarakat di sekitaran pantai Dato kurang untuk perekonomiannya, jadi untuk partisipasi harta benda itu dialihkan ke pemerintah daerah dalam pengembangan pantai Dato”.

(Hasil wawancara ML,06 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek Partisipasi Harta Benda dapat disimpulkan bahwa belum ada karena melihat kondisi masyarakat sangat minim dari segi partisipasi harta benda. Tetapi kita berharap bahwa kedepannya masyarakat dapat memberikan partisipasi harta benda dalam membantu pemerintah untuk mengelolah pantai Dato.

Selanjutnya dapat disimpulkan terkait dengan aspek Partisipasi Harta Benda yang kemudian dikombinasikan dengan hasil observasi selama dilapangan dapat diketahui bahwa Partisipasi Harta Benda belum ada baik dari segi masyarakat secara umum maupun masyarakat lokal disekitar pantai Dato Majene, yang masyarakat tahu bahwa untuk pembiayaan dalam pengelolaan pantai Dato sudah ada dana dari kementerian,

Oleh karena itu kedepannya kita berharap untuk partisipasi harta benda dari masyarakat sebagai penunjang/pendukung dalam perkembangan pariwisata pantai Dato Majene.

4. Partisipasi Keterampilan dan Kemahiran

Partisipasi keterampilan dan kemahiran, yang diberikan orang untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata terkait Partisipasi Keterampilan dan Kemahiran mengatakan bahwa :

“Partisipasi keterampilan dan kemahiran dari masyarakat sudah ada tetapi perlu dikembangkan, makanya kami dari pemerintah melakukan kerja sama dengan komunitas lokal atau kelompok sadar wisata untuk membina masyarakat dalam hal keterampilan dan kemahiran.”

(Hasil wawancara MD,07 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek Partisipasi Keterampilan dan Kemahiran dapat disimpulkan bahwa partisipasi keterampilan dan kemahiran pemerintah berusaha untuk mengembangkan baik dari keterampilan maupun kemahiran, sebagai salah satu daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke pantai Dato Majene.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni Kepala Seksi Pengembangan Kemitraan dan Kerjasama Pariwisata mengatakan bahwa :

“Sudah ada untuk partisipasi dari masyarakat dalam hal keterampilan dan kemahiran namun belum sepenuhnya optimal dikarenakan kita masih membutuhkan orang-orang atau masyarakat untuk memperlihatkan keterampilannya dalam bidang pengembangan pariwisata contohnya pembuatan petaka-petaka yang mengajak pengunjung pantai untuk selalu mengutamakan kebersihan pantai Dato”.

(Hasil wawancara HR,07 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek Partisipasi Keterampilan dan Kemahiran dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat sudah ada namun belum optimal, untuk itu dari pemerintah berharap masyarakat memberikan kontribusinya dalam keterampilan dan kemahiran.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan berikutnya yaitu Ketua Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) yang biasa disebut Komunitas Lokal terkait Partisipasi Buah Pikiran mengatakan :

“Kami dari komunitas lokal yang tergabung dalam kelompok sadar wisata selalu melakukan hal-hal yang baru dalam pengembangan serta pengelolaan pantai Dato, namun sisi lain kami juga biasa kekurangan alat dalam membuat keterampilan atau kemahiran kepada masyarakat disekitar pantai .untuk itu kalau bisa alat untuk membuat keterampilan seperti khas ole-ole pantai diperadakan oleh pemerintah agar supaya kami juga dari komunitas lokal dapat memberikan pemahaman atau mensosialisasikan kepada masyarakat dalam partisipasi keterampilan dan kemahiran”.

(Hasil wawancara HN,07 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek Partisipasi Keterampilan dan Kemahiran dapat disimpulkan bahwa keterampilan dan kemahiran selalu dilakukan dari komunitas lokal yang tergabung dalam kelompok sadar wisata, namun terkadang terkendala alat-alat untuk melakukan keterampilan dan kemahiran. Oleh karenanya pemerintah baiknya menyediakan alat-alat untuk dipakai masyarakat untuk mengelolah pantai Dato.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat mengatakan bahwa :

“Saya melihat biasanya selalu ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para komunitas lokal bersama masyarakat disekitaran pantai Dato contohnya pembuatan petaka, gasebo dll”.

(Hasil wawancara LN,07 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek Partisipasi Keterampilan dan Kemahirandapat disimpulkan bahwa sudah ada untuk partisipasi keterampilan dan kemahiran baik dari pembuatan gazebo, petaka-petaka sehingga pantai dato menjadi indah.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat mengatakan bahwa :

“Partisipasi keterampilan dan kemahiran dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam proses pengembangan pantai Dato Majene agar pantai ini terkenal dengan keindahan-keindahan yang ada, dalam proses inilah perlu adanya keterampilan yang dibuat oleh komunitas lokal bersama masyarakat sebagai salah satu poin untuk pengembangan pantai Dato”.

(Hasil wawancara HS,07 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek Partisipasi Keterampilan dan Kemahirandapat disimpulkan bahwa dari segi partisipasi keterampilan dan kemahiran dari masyarakat sangat dibutuhkan sebagai salah satu indikator dalam pengembangan pantai Dato.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat mengatakan bahwa :

“Keterampilan yang dibuat masyarakat biasanya saya liat sudah ada namun belum terlalu banyak perlu ada pengembangan lagi dalam proses pengembangan pantai Dato”.

(Hasil wawancara RN,07 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek Partisipasi Keterampilan dan Kemahirandapat disimpulkan bahwa sudah ada namun perlu adanya perkembangan lebih baik lagi untuk menarik daya tarik wisatawan untuk berkunjung di pantai Dato Majene.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat mengatakan bahwa :

“Proses partisipasi masyarakat dalam keterampilan dan kemahiran membantu pemerintah dalam pengembangan pantai ini, saya lihat biasanya ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh komunitas lokal bersama masyarakat seperti pembuatan gasebo dll, namun belum sepenuhnya aktif dalam keterampilan masyarakat masih kurang dan masih butuh pengembangan kemahiran lainnya”.

(Hasil wawancara FF, 07 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait dengan aspek Partisipasi Keterampilan dan Kemahiran dapat disimpulkan bahwa sudah ada tetapi perlu ada perkembangan lebih baik lagi dan pemerintah serta masyarakat harus tetap bersinergi dalam pengembangan pantai Dato Majene.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat mengatakan bahwa :

“Melihat partisipasi masyarakat dan teman-teman komunitas lokal dalam bidang keterampilan sudah ada dan selalu ada inisiatif cuma saya lihat teman-teman komunitas ini masih kurang dalam bidang SDM dan alat atau bahan untuk dipakai dalam proses partisipasi keterampilan dan kemahiran”.

(Hasil wawancara ML, 07 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait dengan aspek Partisipasi Keterampilan dan Kemahiran dapat disimpulkan bahwa sudah ada partisipasi keterampilan dan kemahiran tetapi melihat kondisi masih kekurangan sumber daya manusianya (SDM), Untuk itu perlunya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat secara umum untuk mengajak pentingnya pengembangan pariwisata.

Selanjutnya dapat disimpulkan terkait dengan aspek Partisipasi Keterampilan dan Kemahiran yang kemudian dikombinasikan dengan hasil observasi selama dilapangan dapat diketahui bahwa Partisipasi Keterampilan dan Kemahiran sudah ada dari berbagai

masyarakat, Namun perlu adanya pengembangan lebih baik lagi baik dari segi sumber daya manusianya maupun dari segi keikutsertaan dan kesadaran masyarakat secara umum tentang pentingnya pengembangan pariwisata pantai Dato Majene.

5. Partisipasi Sosial

Partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban, misalnya turunan, koperasi, layad (dalam peristiwa kematian), kondangan (dalam peristiwa pernikahan), nyambulang, mulang sambung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata terkait Partisipasi Sosial mengatakan bahwa :

“Partisipasi sosial dalam masyarakat selalu antusias dalam pengembangan pariwisata namun hanya beberapa orang saja seperti komunitas lokal atau kelompok sadar wisata di pantai Dato Majene, kita berharapnya bukan hanya sebagian orang saja ikut berpartisipasi dalam pengembangan wisata pantai Dato tetapi seluruh masyarakat Majene harus ikut serta dalam proses pengembangan pantai ini”

(Hasil wawancara MD,07 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek Partisipasi Sosial dapat disimpulkan bahwa partisipasi sosial masyarakat antusias dalam pengembangan pantai Dato, Namun untuk secara umum belum semua ikut dalam pengembangan pantai Dato jadi perlu adanya kesadaran bagi masyarakat untuk keikutsertaannya dalam proses pengembangan pantai Dato.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni Kepala Seksi Pengembangan Kemitraan dan Kerjasama Pariwisata mengatakan bahwa :

“Dalam partisipasi sosial masyarakat kami dari pemerintah senantiasa selalu saling memberikan masukan tentang pengelolaan pantai Dato, entah itu dari segi pengelolaannya maupun pengembangannya sebagai salah satu bentuk kerja sama dan gotong royong dalam mengembangkan pantai Dato Majene”.

(Hasil wawancara HR,07 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait dengan aspek Partisipasi Sosial dapat disimpulkan bahwa partisipasi sosial selalu ada untuk pengembangan pantai Dato, Baik dari segi pengelolaannya maupun gotong royong untuk pengembangan pantai Dato.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan berikutnya yaitu Ketua Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) yang biasa disebut Komunitas Lokal terkait Partisipasi Buah Pikiran mengatakan :

“Kalau untuk partisipasi sosial kami dari komunitas lokal selalu berusaha untuk melakukan itu, kami biasanya mengajak masyarakat untuk serta dalam berpartisipasi untuk pantai Dato baik dari segi pengelolaan, pengembangan serta keindahan. tetapi hanya beberapa orang saja yang sadar akan hal itu jadi biasa kami kewalahan karena kurangnya sumber daya manusianya”.

(Hasil wawancara HN, 07 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait dengan aspek Partisipasi Sosial dapat disimpulkan bahwa komunitas lokal selalu berusaha untuk melakukan itu, namun hanya beberapa orang saja yang sadar akan pengembangan pantai Dato Majene.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat mengatakan bahwa :

“Partisipasi sosial masyarakat selalu terlihat dan nampak tetapi hanya beberapa orang yang biasa saya lihat mungkin itulah kenapa partisipasi sosial masih kurangnya kesadaran masyarakat secara umum tentang pengelolaan pantai Dato”.

(Hasil wawancara LN, 08 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait dengan aspek Partisipasi Sosial dapat disimpulkan bahwa selalu terlihat dan Nampak namun hanya beberapa saja yang mau dan yang ikut dalam proses pengelolaan pantai Dato Majene.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat mengatakan bahwa :

“Pengembangan partisipasi sosial masyarakat menjadi peran penting dalam membantu pemerintah menurut saya, karena harus selalu bekerjasama antara masyarakat atau komunitas lokal dan pemerintah dalam pengembangan pantai Dato dan saya lihat dari segi partisipasi sosial masih kurang perlu ada pengembangan”.(Hasil wawancara HS,08 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait dengan aspek Partisipasi Sosial dapat disimpulkan bahwa konteks partisipasi sosial menjadi peran sangat penting dalam proses pengelolaan pantai Dato, Tetapi harus lebih baik lagi kedepannya.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat mengatakan bahwa :

“Partisipasi sosial masyarakat sudah ada namun kurang efektif ini penting demi kelancaran pengelolaan pantai Dato selain membantu pemerintah masyarakat atau komunitas lokal juga memberikan dampak positif dalam memberikan kontribusi sosialnya untuk pengembangan wisata Dato”.
(Hasil wawancara RN,08 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait dengan aspek Partisipasi Sosial dapat disimpulkan bahwa sudah ada namun kurang efektif karena melihat kondisi masyarakat masih kurang dalam keikutsertaannya dalam proses pengembangan pantai Dato, pemerintah harus melakukan sosialisasi tentang pentingnya pengembangan pantai Dato.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat mengatakan bahwa :

“Kalau saya melihat sudah baik partisipasi sosialnya namun perlu ditingkatkan lagi untuk kelancaran dalam mengembangkan wisata Dato ini, selain memiliki dampak positif masyarakat disekitaran pantai juga merasa senang apabila sekitaran pantai

Dato rame karna yang kita tahu bahwa sekitaran pantai Dato ini dulunya sangat sunyi ”.

(Hasil wawancara FF,08 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek Partisipasi Sosial dapat disimpulkan bahwa partisipasi sosialnya sudah baik namun perlu ada peningkatan sebagai salah satu indicator kelancaran dalam mengembangkan pantai Dato, Disisi lain masyarakat akan merasa senang ketika pantai Dato rame dengan kunjungan wisatawan dari berbagai daerah.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat mengatakan bahwa :

“Saya melihat partisipasi sosial dari masyarakat masi perlu pembenahan seperti kesadaran masyarakat tentang keikutsertaan dalam gotong royong untuk saling membantu dalam pengembangan dan pengelolaan pantai Dato Majene, kedepannya agar masyarakat sadar bahwa bukan hanya menikmati tetapi ikut serta dalam pengembangan pantai Dato”.

(Hasil wawancara ML,08 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek Partisipasi Sosial dapat disimpulkan bahwa partisipasi social masi perlu pembenahan baik dari segi kesadarannya maupun keikutsertaannya dalam proses pengembangan pantai Dato Majene, Masyarakat juga akan merasa senang ketika pantai Dato rame dengan kunjungan wisatawan dari berbagai daerah diluar dari Majene.

Selanjutya dapat disimpulkan terkait dengan aspek Partisipasi Sosial yang kemudian dikombinasikan dengan hasil observasi selama dilapangan dapat diketahui bahwa Partisipasi Sosial partisipasi sosial sudah ada namun perlu ada pengembangan lebih baik lagi, karna kita melihat bahwa masi banyak masyarakat yang belum sadar akan keikutsertaannya dalam proses pengembangan pantai Dato Majene. Oleh karena itu perlu

adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat agar proses pengelolaan, pengembangan dan manajerial nya baik sesuai yang diharapkan.

C. Pendekatan Masyarakat Dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Dato di Kabupaten Majene

1. Partisipasi Pasif dan Pelatihan Informasi

Tipe komunikasi satu arah seperti antara guru dan muridnya yang ditetapkan diantara staf proyek dan masyarakat setempat pada saat kunjungan ke desa. Paket-paket teknis yang berbeda diiklankan kepada masyarakat untuk menerimanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata terkait Partisipasi Pasif dan Pelatihan Informasi mengatakan bahwa :

“Dari pemerintah kami sudah melakukan kerja sama dengan komunitas lokal dalam hal ini kelompok sadar wisata di pantai Dato, kemungkinan besar kerja sama ini akan terus berjalan sebagai salah satu indikator untuk pengembangan dan pengelolaan pantai Dato, kami berharap kepada masyarakat selalu bersinergi dengan kami karena nantinya bukan hanya pemerintah yang akan merasakan dampak positifnya tetapi masyarakat lokal juga secara umum”
(Hasil wawancara MD, 07 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek Partisipasi Pasif dan Pelatihan Informasi dapat disimpulkan bahwa pemerintah selalu bekerja sama dengan komunitas lokal dalam hal ini kelompok sadar wisata pantai Dato Majene, kedepannya akan terus berjalan untuk kerja sama dalam pengelolaan pantai Dato Majene.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni Kepala Seksi Pengembangan Kemitraan dan Kerjasama Pariwisata mengatakan bahwa :

“Partisipasi dan pelatihan informasi ini lebih berkaitan dengan pemerintah, namun kami biasa melakukan pelatihan-pelatihan tentang pariwisata yang bekerja sama dengan komunitas lokal atau kelompok sadar wisata, namun terkadang masyarakatnya juga kurang sadar contohnya seperti ketika pelatihan sudah

berlangsung masyarakat kadang tidak mengimplementasikan sesuai dengan materi yang ada”.

(Hasil wawancara HR,07 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek Partisipasi Pasif dan Pelatihan Informasi dapat disimpulkan bahwa lebih berkaitan dengan pemerintah karena menyangkut tentang pelatihan informasi dari pemerintah untuk di transfer ke masyarakat, dari segi pelatihan sudah dilakukan namun terkadang masyarakat belum mengimplementasikan secara optimal.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni Ketua Komunitas Lokal atau (POKDARWIS) Kelompok Sadar Wisata mengatakan bahwa :

“Dalam bidang partisipasi pasif dan pematihan informasi komunitas lokal atau kelompok sadar wisata telah melakukan pelatihan yang bekerja sama dengan pemerintah, guna memberikan masukan-masukan untuk pengembangan pantai Dato Majene dan ada beberapa kegiatan-kegiatan yang bersifat membantu masyarakat untuk mengetahui tata cara pengelolaan yang baik ”.(Hasil wawancara HN,07 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek Partisipasi Pasif dan Pelatihan Informasi dapat disimpulkan bahwa sudah ada dilakukan oleh pemerintah yang bekerja sama dengan komunitas lokal yang tergabung dalam kelompok sadara wisata pantai Dato.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat mengatakan bahwa :

“Saya secara pribadi sebenarnya belum tahu apakah partisipasi pasif dan pelatihan informasi ini sudah dilaksanakan di pantai Dato untuk masyarakat atau komunitas lokal, demi suksesnya pengembangan serta pengelolaan pantai Dato perlu adanya pelatihan-pelatihan tentang pengembangan objek wisata”.(Hasil wawancara LN,08 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait dengan aspek Partisipasi Pasif dan Pelatihan Informasi dapat disimpulkan bahwa perlu adanya pelatihan-pelatihan dari pemerintah tentang tata cara pengelolaan dan pengembangan pantai Dato Majene.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat mengatakan bahwa :

“Menurut saya partisipasi pasif di pantai Dato masi perlu ditingkatkan karena melihat kondisi masyarakat lokal juga masi minim dengan tata cara pengelolaan pariwisata yang baik dan benar, jadi kedepannya sebaiknya masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama dalam pengembangan pantai Dato ini”. (Hasil wawancara HS, 08 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait dengan aspek Partisipasi Pasif dan Pelatihan Informasi dapat disimpulkan bahwa perlu adanya peningkatan lebih baik kedepannya karena melihat kondisi masyarakat masi banyak yang belum paham secara optimal tentang proses pengelolaan pantai Dato.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat mengatakan bahwa :

“Kalau partisipasi pasif dalam mengembangkan pariwisata itu sangat mendukung namun yang saya lihat belum terlalu baik perlu adanya pelatihan-pelatihan yang lebih optimal lagi untuk pengembangan wisata pantai Dato, melihat masyarakat juga yang belum paham sepenuhnya tentang pengelolaan yang baik”. (Hasil wawancara RN, 08 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait dengan aspek Partisipasi Pasif dan Pelatihan Informasi dapat disimpulkan bahwa partisipasi pasif dan pelatihan informasi sangat di perlukan untuk masyarakat sebagai tolak ukur pengembangan dan pengelolaan pantai Dato Majene. Karena kita melihat bahwa masyarakat masi minim dari segi pelatihan-pelatihan informasi.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat mengatakan bahwa :

“Ketika melihat kondisi masyarakat dalam partisipasi pasif dan pelatihan informasi masi minim karena yang saya lihat hanya beberapa orang saja yang paham tentang pengelolaan wisata yang baik, untuk itu perlu memberikan masukan-masukan dari pemerintah untuk masyarakat tentang pengelolaan yang baik serta dapat memberikan masukan-masukan kepada masyarakat untuk dipahami paham”. (Hasil wawancara FF, 08 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek Partisipasi Pasif dan Pelatihan Informasidapat disimpulkan bahwa masi minim dari segi partisipasi pasif dan pelatihan informasi untuk itu kedepannya perlu adanya pelatihan-pelatihan selanjutnya dalam konteks pengembangan dan pengelolaannya.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat mengatakan bahwa :

“Kita harus tahu kondisi masyarakat lokal dalam pengelolaan wisata masi kurang, memang sudah ada beberapa pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah dinas pariwisata. tapi untuk lebih mengembangkan itu pelatihan seperti itu harus tetap berkelanjutan sebagai patnert pemerintah dalam bekerja sama untuk pengembangan pantai Dato ”. (Hasil wawancara ML, 08 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek Partisipasi Pasif dan Pelatihan Informasidapat disimpulkan bahwa sudah ada beberapa pelatihan-pelatihan yang dilakukan pemerintah, namun perlu adanya pelatihan-pelatihan berkelanjutan sebagai salah satu unsur untuk pengembangan pariwisata pantai Dato Majene.

Selanjutnya dapat disimpulkan terkait dengan aspek Partisipasi Pasif dan Pelatihan Informasi yang kemudian dikombinasikan dengan hasil observasi selama dilapangan dapat diketahui bahwa Partisipasi Pasif dan Pelatihan Informasi sudah ada

beberapa pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah, namun masih perlu pengembangan yang berkelanjutan, disini lagi masyarakat juga terkadang masih banyak yang belum mengimplementasikan dengan baik. Oleh karena itu pemerintah harus tetap melakukan pelatihan berkelanjutan untuk masyarakat demi pemahaman kepada masyarakat tentang pengelolaan yang baik dan sistematis.

2. Sesi Partisipasi Aktif

Dialog dan komunikasi dua arah memberikan kepada masyarakat kesempatan untuk berinteraksi dengan npetugas penyuluh dan pelatih dari luar . Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata terkait Sesi Partisipasi Aktif mengatakan bahwa :

“Untuk sesi partisipasi aktif masyarakat beserta komunitas lokal atau kelompok sadar wisata (POKDARWIS) alhamdulillah mereka sangat antusias dalam proses pengembangan pantai Dato, tetapi kami dari pemerintah masih banyak kendala seperti contohnya hanya beberapa masyarakat yang sadar akan keikutsertaan dalam pengembangan pantai Dato. Kita berharap kedepannya masyarakat secara umum Majene harus semua ikut serta dalam membantu pemerintah untuk pengembangan wisata Dato”. (Hasil wawancara MD, 07 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek Sesi Partisipasi Aktif dapat disimpulkan bahwa sesi partisipasi aktif hanya beberapa masyarakat yang ikut dalam pengembangan dan pengelolaan pantai Dato, dikarenakan masyarakat secara umum belum mempunyai kesadaran dalam proses pengembangan pantai Dato.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni Kepala Seksi Pengembangan Kemitraan dan Kerjasama Pariwisata mengatakan bahwa :

“Sesi partisipasi aktif dari masyarakat lokal atau komunitas lokal sudah baik tetapi perlu ada pengembangan lebih baik kedepannya untuk menjadi teman kerja sama pemerintah dalam pengelolaan serta pengembangan agar para wisatawan yang berkunjung bisa melihat bahwa antara pemerintah dan masyarakat lokal atau

komunitas lokal selalu bekerja sama dengan baik dan menjadi contoh untuk Kabupaten Majene sebagai destinasi wisata yang dapat untuk ditiru, kita berharap seperti itu ke depan”.

(Hasil wawancara HR,07 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait dengan aspek Sesi Partisipasi Aktif dapat disimpulkan bahwa pemerintah dan komunitas lokal atau kelompok sadar wisata selalu berusaha untuk dapat bekerja sama dalam pengembangan pantai Dato, Sebagai contoh destinasi wisata yang dapat ditiru oleh para wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni Ketua Komunitas Lokal (POKDARWIS) Kelompok Sadar Wisata mengatakan bahwa :

“Kami dari masyarakat lokal atau komunitas lokal selalu antusias dalam pengembangan pantai Dato ini, kami sudah mempunyai SK dari Bupati untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam pengelolaan pantai Dato Majene. Kami juga berharap kedepannya keseluruhan masyarakat Majene dapat bergabung untuk memberikan partisipasinya”.

(Hasil wawancara HN,07 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait dengan aspek Sesi Partisipasi Aktif dapat disimpulkan bahwa komunitas lokal yang tergabung dalam kelompok sadar wisata selalu antusias dalam pengembangan pantai Dato, dan kedepannya kita berharap agar masyarakat secara umum dapat berkontribusi dalam peningkatan pariwisata pantai Dato Majene.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat mengatakan bahwa :

“Menurut saya sesi partisipasi aktif masih kurang maunya itu keseluruhan masyarakat Majene harus ikut serta dalam hal pengembangan wisata Dato, karena ketika pantai Dato ini sudah lebih baik yang akan merasakan masyarakat juga pasti jadi semua baiknya ikut serta dalam proses pengembangan pantai Dato Majene”.(Hasil wawancara LN,08 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait dengan aspek Sesi Partisipasi Aktif dapat disimpulkan bahwa sesi partisipasi aktif masih kurang untuk keseluruhan masyarakat Majene, kedepannya kita berharap masyarakat secara umum harus ikut berpartisipasi baik dari segi pengelolaan maupun pengembangannya karena ketika pantai Dato sudah berkembang masyarakat secara umum yang akan merasakannya.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat mengatakan bahwa :

“Kalau saya proses partisipasi aktif masyarakat sudah baik namun perlu ada pembenahan lagi dan kesadaran karena kita biasa lihat hanya beberapa orang saja yang mau saling membantu, untuk itu kedepannya bagus ketika masyarakat sadar akan pentingnya dikelola pantai Dato sebagai salah satu daya tarik wisatawan untuk dikunjungi”. (Hasil wawancara HS, 08 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait dengan aspek Sesi Partisipasi Aktif dapat disimpulkan bahwa perlu adanya pembenahan dan kesadaran masyarakat karena hanya beberapa orang saja yang ikut serta dalam berkontribusi, pemerintah harus banyak mensosialisasikan tentang pengelolaan pantai Dato.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat mengatakan bahwa :

“Seperti yang kita lihat bahwa partisipasi aktif dari masyarakat sudah ada tinggal dikembangkan dengan baik, karena masyarakat juga perlu ruang untuk belajar dalam hal pengelolaan pariwisata yang baik”.
(Hasil wawancara RN, 08 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait dengan aspek Sesi Partisipasi Aktif dapat disimpulkan bahwa sudah ada tinggal dikembangkan dengan baik

selanjutnya perlu adanya ruang belajar bagi masyarakat dalam hal pengembangan pantai Dato Majene.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat mengatakan bahwa :

“Sesi partisipasi aktif wajib dilakukan oleh masyarakat lokal sebagai teman kerja sama pemerintah dalam pengelolaan pantai Dato, kedepannya kita mengharapkan ada kegiatan-kegiatan yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung di pantai Dato Majene”.(Hasil wawancara FF,08 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek Sesi Partisipasi Aktif dapat disimpulkan bahwa sesi partisipasi aktif wajib dilakukan oleh masyarakat sebagai partner pemerintah dalam pengelolaan dan pengembangan pantai Dato, dan kedepannya kita berharap supaya kedepan ada kegiatan-kegiatan yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung di pantai Dato. Di sisi lain kita berharap proses kerja sama antar pemerintah dan masyarakat serta komunitas lokal tetap berjalan sebagai tolak ukur pengembangan pantai Dato Majene.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat mengatakan bahwa :

“Kalau partisipasi aktif masih perlu pembenahan dalam masyarakat karena biasa ada masyarakat yang mau berpartisipasi tetapi tidak tahu apa yang akan dikerjakan, jadi kedepannya harus ada pelatihan-pelatihan untuk masyarakat tentang pengelolaan pantai Dato yang baik dan benar”.
(Hasil wawancara ML,08 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek Sesi Partisipasi Aktif dapat disimpulkan bahwa partisipasi aktif masih perlu pembenahan dalam masyarakat dikarenakan banyak yang dari masyarakat masih butuh arahan-arahan tentang tata kelola pantai Dato dengan baik.

Selanjutnya dapat disimpulkan terkait dengan aspek Sesi Partisipasi Aktif yang kemudian dikombinasikan dengan hasil observasi selama dilapangan dapat diketahui bahwa Sesi Partisipasi Aktif sudah baik dari masyarakat tetapi perlu pembenahan lagi dan partisipasi aktif yang berkelanjutan, pemerintah dan masyarakat harus tetap bekerja sama dalam hal proses pengembangan serta pengelolaan pantai Dato, selanjutnya sesi partisipasi aktif ini sangat membantu pemerintah karena melihat dari sumber daya manusianya dari pemerintah tidak cukup untuk menegelola pantai Dato. Untuk itu masyarakat serta komunitas lokal yang tergabung dalam kelompok sadar wisata harus tetap membantu pemerintah demi baiknya pengelolaan dan pengembangan pantai Dato Majene.

3. Partisipasi dengan Keterikatan

(Pendekatan “kontrak tugas yang dibayar”: bila anda melakukan ini, maka proyek akan melakukan itu). Masyarakat setempat tidak baik sebagai pribadi ataupun kelompok kecil, diberikan pilihan untuk terikat pada sesuatu dengan tanggungjawab atas setiap kegiatan pada masyarakat dan juga pada proyek. Manfaatnya : dapat dibuat modifikasi seiring tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata terkait Partisipasi dengan Keterikatan mengatakan bahwa :

“Partisipasi keterikatan sudah ada komunitas lokal yang bekerja sama dengan pemerintah untuk pengelolaan pantai Dato, seperti aturan-aturan yang akan dilakukan baik dari pemerintah maupun komunitas lokal atau kelompok sadar wisata”. (Hasil wawancara MD,07Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek Partisipasi dengan Keterikatan dapat disimpulkan bahwa sudah ada aturan-aturan tentang kerja sama antara pemerintah dan komunitas lokal yang tergabung dalam

kelompok sadar wisata pantai Dato tinggal perlu adanya komunikasi yang baik secara berkelanjutan.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni Kepala Seksi Pengembangan Kemitraaan dan Kerjasama Pariwisata mengatakan bahwa :

“Partisipasi keterikatan jadi pemerintah dan komunitas lokal yang ada di pantai Dato itu sudah ada aturan tentang kerja samanya dalam pemeliharaan dan pengelolaan pantai Dato”.(Hasil wawancara HR,07 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek Partisipasi dengan Keterikatan dapat disimpulkan bahwa sudah ada kerja sama pemerintah dan komunitas lokal baik dari segi pemeliharaannya maupun tata kelolanya.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni Ketua Komunitas Lokal Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) mengatakan bahwa :

“Kalau masalah keterikatan sudah ada karena sesuai SK Bupati Majene yang memberikan wewenang antara pemerintah dians pariwisata dan komunitas lokal untuk bekerjasama dalam hal pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan seperti contohnya hasil dari kas pantai Dato dibagi antara pemerintah dan komunitas lokal 45 % pemerintah, 45% komunitas lokal dan 10 persen untuk pemeliharaan seperti kebersihan”.(Hasil wawancara HN,07 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek Partisipasi dengan Keterikatan dapat disimpulkan bahwa sudah ada sesuai dengan surat keputusan (SK) Bupati Majene tentang pengangkatan kelompok sadar wisata untuk pengelolaan pantai Dato Majene.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat mengatakan bahwa :

“Kalau saya belum terlalu tahu tentang partisipasi keterikatan antara pemerintah dan komunitas lokal, tapi biasa saya lihat antara masyarakat dan pemerintah saling bekerja sama dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekitaran pantai Dato Majene”.(Hasil wawancara LN,08 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait dengan aspek Partisipasi dengan Keterikatan dapat disimpulkan bahwa pemerintah dan masyarakat saling bekerja sama dalam hal kegiatan-kegiatan yang dilakukan disekitar pantai Dato Majene.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat mengatakan bahwa :

“Partisipasi keterikatan masyarakat dalam ikut serta sangat dibutuhkan sebagai indikator penunjang untuk ada batasan-batasan dari pihak pemerintah maupun masyarakat lokal tetapi yang kita lihat terkadang beberapa masyarakat belum sadar akan hak dan tanggung jawab bersama ”.

(Hasil wawancara HS,08 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait dengan aspek Partisipasi dengan Keterikatan dapat disimpulkan bahwa partisipasi keterikatan masyarakat sangat diperlukan sebagai penunjang untuk pengelolaan pantai Dato Majene, namun beberapa masyarakat masih banyak yang belum sadar akan hak dan tanggung jawabnya.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat mengatakan bahwa :

“Partisipasi keterikatan antara pemerintah dan komunitas lokal saya lihat sudah ada dengan terbitnya beberapa aturan-aturan yang saling mengikat dalam proses pengembangan pantai Dato”.(Hasil wawancara RN, 08 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait dengan aspek Partisipasi dengan Keterikatan dapat disimpulkan bahwa sudah ada beberapa aturan-aturan yang mengikat untuk tata kelola pantai Dato dan pengembangannya, kedepannya kita berharap agar supaya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat bias bekerja sama dengan baik.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat mengatakan bahwa :

“Salah satu bentuk keinginan masyarakat dalam pengembangan pantai Dato dengan ikutnya mereka berpartisipasi seperti contohnya partisipasi keterikatan dengan pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan sesuai dengan aturan yang ada, namun belum sepenuhnya masyarakat ikut serta dalam hal pengelolaannya. kedepannya bagus ketika sudah saling memberikan masukan yang disertai dengan aturan-aturan yang ada”.

(Hasil wawancara FF, 08 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek Partisipasi dengan Keterikatan dapat disimpulkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya ikut serta dalam pengelolaan pantai Dato, dikarenakan masyarakat belum sadar secara umum tentang pelestarian pantai Dato kedepannya masyarakat dan pemerintah harus saling memberikan masukan-masukan tentang tata kelola pantai Dato.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat mengatakan bahwa :

“Yang saya lihat Komunitas lokal dan pemerintah selalu bersinerji dalam pengelolaan pantai Dato majene dan sudah ada kesepakatan atau aturan yang mengikat dalam pengelolaan pantai Dato, komunikasi juga saya lihat sudah baik tinggal dikembangkan”.(Hasil wawancara ML, 08 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek Partisipasi dengan Keterikatan dapat disimpulkan bahwa pemerintah dan komunitas lokal selalu bersinerji apalagi sudah ada aturan-aturan yang saling membantasi dari segi pengelolaan dan pengembangan tinggal komunikasinya dikembangkan.

Selanjutnya dapat disimpulkan terkait dengan aspek Partisipasi dengan Keterikatan yang kemudian dikombinasikan dengan hasil observasi selama dilapangan

dapat diketahui bahwa Partisipasi dengan Keterikatan sudah baik namun perlu adanya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat sebagai salah satu unsur pengembangan pantai Dato, disisi lain sudah ada aturan-aturan yang saling mengikat dalam hal tata kelola pantai Dato Majene.

4. Partisipasi Atas Permintaan Setempat

(Pendekatan "*Participatory Rural Appraisal*" dan kegiatan proyek berfokus lebih kegiatan penelitian, pendekatan yang didorong oleh permintaan). Kegiatan proyek lebih berfokus lebih pada menjawab kebutuhan yang dinyatakan oleh masyarakat setempat, bukan kebutuhan yang dirancang dan disuarakan oleh orang luar. Metode yang dipakai adalah motivasi dan animasi bukan "menjual atau mendorong". Pertanyaan sukarela dan permintaan untuk bantuan serta lebih banyak informasi jelas diperlukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata terkait Partisipasi Atas Permintaan Setempat mengatakan bahwa :

"Partisipasi permintaan setempat atau komunitas lokal antusias dalam ikut serta pengembangan destinasi wisata pantai Dato ini akan membantu pemerintah dalam pengembangan-pengembangan yang berkelanjutan, dengan adanya komunitas lokal atau (POKDARWIS)". (Hasil wawancara MD, 07 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek Partisipasi Atas Permintaan Setempat dapat disimpulkan bahwa komunitas lokal ikut serta dalam pengembangan pantai Dato Majene ini baik sebagai patnert kerja sama dengan pemerintah untuk mendukung tata kelola pantai Dato.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni Kepala Seksi Pengembangan Kemitraan dan Kerjasama Pariwisata mengatakan bahwa :

“Komunitas lokal atau kelompok sadar wisata (POKDARWIS) mereka menawarkan diri untuk di berikan wewenang dalam ikut serta pengembangan dan pengelolaan pariwisata yang dibuktikan dengan SK Bupati Majene serta sebagai patnert pemerintah dalam proses pengembangan wisata”.(Hasil wawancara HR, 07 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek Partisipasi Atas Permintaan Setempat dapat disimpulkan bahwa komunitas lokal ini menawarkan untuk diberikan wewenang dalam pengelolaan pariwisata pantai Dato yang bekerja sama dengan pemerintah yang dibuktikan dengan surat keputusan Bupati Majene.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni Ketua Komunitas Lokal atau (POKDARWIS) Kelompok Sadar Wisata mengatakan bahwa :

“Sebelum pemerintah masuk dalam mengelola pantai Dato komunitas lokal sudah hadir untuk mengelola pantai Dato, namun secara regulasi pemerintah belum resmi, dan pada tanggal 24 oktober 2018 dengan surat keputusan Bupati Majene telah memberikan SK kepada kami sebagai bahan pertimbangan untuk ikut serta dalam pengelolaan dan pengembangan pantai Dato serta membantu pemerintah dalam hal ini dinas pariwisata ”.

(Hasil wawancara HN, 07 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek Partisipasi Atas Permintaan Setempat dapat disimpulkan bahwa sebelum pemerintah masuk untuk mengelolah pantai Dato komunitas lokal beserta masyarakat lokal sudah hadir untuk menegelola pantai Dato, Namun sering berjalannya waktu pemerintah masuk dan bekerja sama dengan komunitas lokal yang ada di pantai Dato Majene.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat mengatakan bahwa :

“Partisipasi permintaan setempat yang saya lihat ada beberapa yang dilakukan oleh masyarakat di sekitaran Dato, seperti contohnya mereka menyingginkan untuk

lahan parkir itu dikelola oleh masyarakat sekitaran pantai Dato dengan alasan lahan itu tanah mereka”.(Hasil wawancara LN, 08 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek Partisipasi Atas Permintaan Setempat dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan kesepakatan dari pemerintah lahan parkir disekitaran pantai Dato dikelola oleh masyarakat lokal.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat mengatakan bahwa :

“Menurut saya partisipasi permintaan setempat atau masyarakat lokal itu perlu sebagai bahan kepada pemerintah untuk mengetahui pengelolaan pantai Dato seperti pemahaman dari pemerintah tentang pengembangan wisata Dato”(Hasil wawancara HS, 08 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek Partisipasi Atas Permintaan Setempat dapat disimpulkan bahwa sebagai bahan kepada masyarakat secara umum tentang tata kelola pantai Dato yang baik, disini lain ini akan berdampak positif kepada masyarakat ketika tetap berlanjut.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat mengatakan bahwa :

“Menurut saya partisipasi atas permintaan setempat memiliki banyak dampak positif seperti halnya ketika masyarakat merekomendasikan kepada dinas pariwisata untuk masyarakat lokal membuat kegiatan-kegiatan yang dampak menarik perhatian wisatawan untuk berkunjung di pantai Dato, selain itu masyarakat juga yang tadinya tidak memiliki pekerjaan atau putus sekolah bisa membuat lahan-lahan untuk menjual dan segala macamnya”.(Hasil wawancara RN, 08 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek Partisipasi Atas Permintaan Setempat dapat disimpulkan bahwa sebagai bahan pertimbangan masyarakat tentang kegiatan-kegiatan yang menarik wisatawan untuk

berkunjung di pantai Dato Majene, serta masyarakat juga akan mendapatkan dampak positif bagi masyarakat.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat mengatakan bahwa :

“Partisipasi permintaan setempat saya lihat sudah dilakukan beberapa masyarakat karna mereka juga membutuhkan itu tetapi dengan adanya aturan dalam pantai Dato ketika ingin menjual harus melapor ke pemerintah untuk ditindak lanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku”.

(Hasil wawancara FF, 08 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek Partisipasi Atas Permintaan Setempat dapat disimpulkan bahwa sudah dilakukan tetapi dari segi aturan ketika ingin menjual disekitaran pantai Dato mereka harus malapor ke dinas pariwisata untuk ditindak lanjuti sesuai dengan aturan yang ada.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat mengatakan bahwa :

“Peningkatan partisipasi masyarakat sangat diperlukan saya sebagai masyarakat sadar bahwa dalam proses pengembangan wisata masyarakat harus hadir sebagai teman kerja sama pemerintah, dalam partisipasi permintaan setempat sudah ada tinggal dikembangkan”.

(Hasil wawancara ML, 08 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek Partisipasi Atas Permintaan Setempat dapat disimpulkan bahwa masyarakat sangat dibutuhkan oleh pemerintah untuk patnert kerja sama dalam hal pembinaan masyarakat lokal secara umum dalam pengelolaan dan pengembangan pantai Dato Majene.

Selanjutya dapat disimpulkan terkait dengan aspek Partisipasi Atas Permintaan Setempat yang kemudian dikombinasikan dengan hasil observasi selama dilapangan dapat diketahui bahwa Partisipasi Atas Permintaan Setempat dilakukan oleh masyarakat

sendiri atau komunitas lokal dengan demikian antara pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dengan baik dari segi pengelolaan dan pengembangan pantai Dato, sesuai dengan regulasi atau aturan yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di DISBUDPAR Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene dan Komunitas Lokal atau Kelompok sadar wisata (POKDARWIS) di pantai Dato Majene mengenai partisipasi komunitas lokal dalam pengelolaan pariwisata pantai Dato di Kabupaten Majene, maka dari itu peneliti menyimpulkan:

1. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata pantai Dato sudah dijalankan dengan cukup baik tetapi segi keberhasilan dan bentuk partisipasi belum optimal yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan yang dimana dari segi partisipasi harta benda belum ada dari masyarakat secara umum maupun masyarakat lokal disekitar pantai Dato Majene, karena yang masyarakat tahu bahwa untuk pembiayaan dalam pengelolaan pantai Dato sudah ada dana dari kementerian, tetapi Partisipasi Komunitas Lokal Dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai yang lain telah dijalankan oleh Komunitas Lokal atau Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) serta masyarakat sekitar pantai Dato seperti partisipasi buah pikiran, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan dan kemahiran, partisipasi sosial. Yang menjadi titik sentral sehingga tidak optimalnya partisipasi masyarakat secara umum adalah karena minimnya kesadaran yang dimiliki, tata kelola pengelolaan pariwisata belum sepenuhnya di pahami oleh masyarakat secara umum serta masih terdapat masyarakat lokal yang mengabaikan regulasi yang sudah ditetapkan

oleh Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Parawisata tentang penyamaan retribusi pantai Dato.

2. Pendekatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata pantai Dato sudah dijalankan namun dari segi optimalnya belum, Hal ini dibuktikan sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan bahwa dari beberapa partisipasi yang ada seperti, Partisipasi pasif dan pelatihann informasi, sesi dalam partisipasi aktif, partisipasi keterikatan, dan partisipasi atas permintaan setempat belum optimal sepenuhnya dikarenakan dari segi partisipasi pasif dan pelatihan informasi terkadang masyarakat terkendala untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik di sekitar pantai Dato Majene. Pelatihan-pelatihan tentang infomasi dan teknologi masi dibutuhkan oleh masyarakat untuk pengembangan pariwisata pantai Dato Majene.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di DISBUDPAR Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene dan Komunitas lokal atau kelompok sadar wisata (POKDARWIS) pantai Dato mengenai partisipasi komunitas lokal dalam pengelolaan pariwisata pantai Dato di Kabupaten Majene. dan melihat permasalahan yang terjadi, maka dari itu peneliti menyarankan:

1. Pemerintah daerah Kabupaten Majene perlu melakukan kajian berbagai kebijakan, Sistem strategi kelembagaan, dan proram pengelolaan pariwisata yang sedang berjalan. Apakah hasil yang dicapai oleh kebijakan, strategi kelembagaan, dan proram telah memenuhi harapan masyarakat dalam komunitas dan apakahperlu didesain ulang untuk mendapatkan kualitas hasil yang lebih baik.

2. Bagi DISBUDPAR Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan yang berbasis budaya lokal, kesehatan dan kelestarian lingkungan sekitar yang tidak mengganggu habitat yang terdapat di dalamnya. Selain itu pembenahan fasilitas penunjang pariwisata untuk lebih diperhatikan dalam menarik dan meningkatkan daya tarik wisatawan.
3. Bagi Komunitas Lokal atau Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) pantai Dato untuk tetap melaksanakan program-program berdasarkan sasaran strategis pengelolaan dan arah kebijakan baik dari sisi fisik dan ekologis, teknis, serta sisi sosial ekonomi dan budaya. Serta melibatkan masyarakat lokal dalam setiap kegiatan agar supaya masyarakat lokal paham tentang pentingnya pelestarian pariwisata pantai Dato Majene.
4. Bagi masyarakat lokal agar memberikan partisipasinya atau kontribusinya dalam setiap pengelolaan pariwisata pantai Dato, entah dari segi partisipasi buah pikiran, partisipasi tenaga, dan partisipasi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita, 2011. "Prinsip Pembangunan Pariwisata" dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Indonesia: Jurnal Administrasi Publik Volume VII (hlm. 182-188). Makassar: Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II Lembaga Administrasi Negara.
- Darsoprajitno, H Soewarno. 2002. *EkologiPariwisata*. Bandung: Angkasa.
- Damanik, Jonathan, dan Weber, Helmut. 2006. *PerencanaanEkowisata Dari TeoriKeAplikasi*. Yogyakarta: PUSPAR UGM danAndi Offset.
- Dowling,RKdan Fennel, DA.2003.*KonteksKebijakanEkowisatadanPerencanaan*. Jakarta: GramediaPustakaUtama.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 2002. *Hukum Tata Lingkungan*.Yogyakarta: GadjahMada University Press
- Huraerahabu, 2011. *Pengorganisasian Dan Pengembangan Masyarakat*, Bandung, Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI).
- Hadwin. 2015. *PariwisatadanManajemenPariwisata*. Sumber: <http://hadwinsaleh5.blogspot.co.id/2013/01/pariwisata-dan-manajemen-pariwisata.html>. Diaksespadatanggal 07 Agustus 2018, padapukul 18.21 Wita.
- Hasibuan, 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi.Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Igedepitana, I Ketut Surya Diarta, 2009, *PengantarIlmuPariwisata*Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Joyosuharto, S., 2000. *Aspek Ketersediaan dan Tuntutan Kebutuhan Dalam Pariwisata, dalam Dasar-dasar Manajemen Kepari-wisataan Alam*, (Editor: CH. Fandeli), Yogyakarta: Liberty
- Manullang, M. 1982. *Dasar-dasarManajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marpaung, Happy. 2002. *PengantarPariwisata*. Bandung: Alfabeta.
- Mikkelsen, 2011. *Metode Penelitian Partisipasi dan Upaya Pemberdayaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Najib, (2005). *Keberhasilan Partisipasi Masyarakat*. Sumber: <https://mafiadoc.com>. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan.
- Pendit, Nyoman. (1999). *Ilmu Parawisata*. Jakarta: Akademi Pariwisata Trisakti

Pengantar Ilmu Pariwisata, Prof. Dr. IGdepitana, M.Sc., I Ketut Surya Diarta, SP., MA, Penerbit Andi Yogyakarta, 2009

Pitana, I Gededan Diarta Surya I Ketut. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset.

Rachmat. 1986. *Manajemen Suatu Pengantar*. Bandung: Remadja Karya.

Soekadijo. 2000. *Anatomi Pariwisata*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Soekadijo. 1996. *Anatomi Pariwisata*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Soebiato Poerwoko, Mardikanto Totok,
2015. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*,
Bandung, Cv. Alfabeta.

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Safroni, Ladzi. 2012. *Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik dalam Konteks Birokrasi Indonesia*. Surabaya: Aditya Media Publishing.

Tresiana dan Duadji, 2017. *Kebijakan Publik Teori Dan Praktek Model-Model Pengelolaan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta, Sulu Media.

Terry, George dan Rue Leslie W. 2010. *Dasar-dasar Manajemen*. Cetakan Kesebelas. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

www.mandarnews.com/2016/09/27/kemenpar-tunjuk-majene-sebagai-kawasan-pengembangan-pariwisata-nasional/

Yoeti, A Oka. 2008. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Cetakan Kedua. Bandung: PT. Pradnya Paramita

RIWAYAT HIDUP



Wahyu, lahir pada tanggal 25 Oktober 1996 di Sulay, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene. Ia anak ketiga dari 3 bersaudara, buah cinta dari pasangan M.Yusuf dan Naharia. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SD 13Sulay mulai tahun 2003 sampai tahun 2008. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 4 Salutambung dan tamat pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2011 penulis melanjutkan pendidikan di SMKN2Majene dan tamat tahun 2014. Kemudian pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar pada jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik strata 1 (S1). Dalam organisasi intra kampus penulis juga merupakan salah seorang dari badan pengurus harian Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar Periode 2016-2017 dan 2017-2018 yang sebelumnya menjadi pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara (HUMANIERA) sebagai Sekretaris bidang pengembangan organisasi dan anggota tahun 2016-2017, di tengah kepengurusan 2016-2017 penulis diangkat sebagai Ketua komunitas ilmiah mahasiswa administrasi publik HUMANIERA. Pada tahun 2019 penulis berhasil mempertanggungjawabkan hasil karya ilmiah di depan penguji yang berjudul “Partisipasi Komunitas Lokal dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Dato di Kabupaten Majene” dan mendapatkan gelar S.Sos.